



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dilakukan perubahan menjadi *lumpsum* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga perlu dilakukan perubahan Standar Harga Satuan Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan adalah standar harga yang ditetapkan terhadap harga satuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Kota Pariaman.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

Standar Harga Satuan meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya belanja jasa;
- c. satuan biaya pemeliharaan; dan
- d. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
 - b. satuan biaya honorarium pengadaan barang dan jasa;
 - c. honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa;
 - d. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
 - e. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - f. honorarium panitia pelaksana kegiatan;
 - g. honorarium penyelenggara ujian; dan
 - h. honorarium penyelenggara pendidikan/pelatihan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- (2) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Standar biaya belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. belanja jasa administrasi kantor/tenaga harian lepas /sopir/non aparat sipil negara lainnya;
 - b. belanja operasional;
 - c. belanja jasa narasumber;
 - d. jasa tim penilai, wasit dan sejenisnya;
 - e. hadiah/lomba/penghargaan;
 - f. jasa pelayanan kesehatan;
 - g. biaya transportasi;
 - h. perjalanan dinas khusus;
 - i. jasa petugas upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan hari besar nasional lainnya tingkat kota dan kecamatan;
 - j. jasa publikasi;
 - k. belanja perencanaan pembuatan desain, bestek, gambar;
 - l. satuan biaya konsumsi rapat; dan
 - m. satuan biaya uang lembur dan uang makan.
- (2) Standar biaya belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Standar biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
 - b. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas; dan
 - c. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Standar biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

Pasal 6

- (1) Standar biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. satuan biaya uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang;
 - d. satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
 - e. satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama; dan
 - f. satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas dalam negeri tidak dapat memperoleh bukti pengeluaran biaya, maka dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas harus dilengkapi dengan daftar pengeluaran riil, pakta integritas, dan kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besar biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.
- (2) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 9

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintah Daerah, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 37 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Pariaman ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 4



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR BIAYA HONORARIUM

Standar Honorarium terdiri atas:

1. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
2. satuan biaya honorarium pengadaan barang dan jasa;
3. honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa;
4. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
5. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah;
6. honorarium panitia pelaksana kegiatan;
7. honorarium penyelenggara ujian; dan
8. honorarium penyelenggara pendidikan/pelatihan/diklat.

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

| No. | Uraian | Satuan | Besaran |
|-------|--|--------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | |
| 1.1.1 | PPKD/PA/KPA | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp520.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta | OB | Rp625.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta | OB | Rp725.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | OB | Rp830.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2,5 miliar | OB | Rp985.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar | OB | Rp1.140.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar | OB | Rp1.295.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar | OB | Rp1.505.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar | OB | Rp1.710.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar | OB | Rp1.920.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar | OB | Rp2.125.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | Rp2.385.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | Rp2.645.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | Rp2.905.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 Triliun | OB | Rp3.165.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Triliun | OB | Rp3.685.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

| No. | Uraian | Satuan | Besaran |
|-------|--|--------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.1.2 | PPK SKPD | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp200.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta | OB | Rp240.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta | OB | Rp285.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | OB | Rp330.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar | OB | Rp385.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar | OB | Rp440.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar | OB | Rp495.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar | OB | Rp625.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar | OB | Rp760.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar | OB | Rp890.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar | OB | Rp1.020.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | Rp1.464.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | Rp1.698.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | Rp1.938.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun | OB | Rp2.172.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun | OB | Rp2.652.000,00 |
| 1.1.3 | PPTK | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp505.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta | OB | Rp605.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta | OB | Rp705.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | OB | Rp805.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar | OB | Rp955.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar | OB | Rp1.105.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar | OB | Rp1.260.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar | OB | Rp1.460.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar | OB | Rp1.660.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar | OB | Rp1.860.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar | OB | Rp2.065.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | Rp2.315.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | Rp2.565.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | Rp2.820.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun | OB | Rp3.070.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun | OB | Rp3.570.000,00 |
| 1.1.4 | Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp170.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta | OB | Rp210.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta | OB | Rp250.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

| No. | Uraian | Satuan | Besaran |
|-------|---|--------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | OB | Rp285.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar | OB | Rp335.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar | OB | Rp385.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar | OB | Rp430.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar | OB | Rp545.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar | OB | Rp660.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar | OB | Rp775.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar | OB | Rp890.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | Rp1.060.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | Rp1.235.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | Rp1.405.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun | OB | Rp1.580.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun | OB | Rp1.920.000,00 |
| 1.1.5 | Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp130.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta | OB | Rp155.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta | OB | Rp185.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | OB | Rp215.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar | OB | Rp250.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar | OB | Rp285.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar | OB | Rp320.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar | OB | Rp405.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar | OB | Rp490.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar | OB | Rp575.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar | OB | Rp665.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OB | Rp790.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OB | Rp920.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar | OB | Rp1.045.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun | OB | Rp1.175.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun | OB | Rp1.430.000,00 |
| 1.1.6 | Pejabat Pembuat Komitmen | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta | OB | Rp375.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana diatas 100 Juta s.d Rp1 miliar | OB | Rp425.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar | OB | Rp500.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar | OB | Rp575.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp7.5 miliar | OB | Rp625.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

| No. | Uraian | Satuan | Besaran |
|-----|---|--------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp7.5 miliar | OB | Rp725.000,00 |

Catatan:

I. Penetapan Pejabat Pelaksana APBD

Kepala Daerah segera menetapkan Pejabat Pelaksana APBD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah. antara lain:

- a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD;
- c) Kepala SKPD selaku PA;
- d) Kuasa BUD;
- e) KPA dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA;
- f) Bendahara Penerimaan;
- g) Bendahara Pengeluaran;
- h) Bendahara Khusus;
- i) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA; dan
- j) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA.

II Kuasa Pengguna Anggaran

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA dengan pertimbangan berdasarkan besaran anggaran kegiatan. lokasi. dan/atau rentang kendali sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. sebagai berikut:

- a. Pertimbangan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh SKPD mendasari kriteria yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan. antara lain:
 - 1) besaran anggaran dan jumlah kegiatan serta sub kegiatan yang dikelola oleh PA; dan
 - 2) perhitungan jumlah dokumen pertanggungjawaban dari aktivitas pencapaian output setiap sub kegiatan dalam pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan dan pembayaran. sehingga membutuhkan pelimpahan.
- b. Pertimbangan lokasi. dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas. unit pelaksana teknis daerah dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

2. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA maka perlu dibentuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan Keputusan Wali Kota.
3. Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. menetapkan pejabat yang melakukan proses pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:
 - a. Berdasarkan ketentuan Bab I Butir E.8 dan Butir F.10. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:
 1. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa. PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 2. apabila PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa. KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74A ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:
 1. dalam hal PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan barang/jasa. PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 2. PPTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen wajib memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1.

Untuk kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara tidak dilimpahkan. tetap menjadi kewenangan PA dan Bendahara Pengeluaran (BP).

III Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan Pejabat pada SKPD/unit SKPD selaku PPTK.
2. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

4. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
5. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural. PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - 2) Pangkat minimal Penata muda golongan III.a;
 - 3) Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 - 4) Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas PPTK.

IV Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
2. Pada Pengelolaan Keuangan BLUD. PPK SKPD melaksanakan fungsi Tata Usaha keuangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang BLUD.
3. PPK SKPD tidak merangkap sebagai Pejabat dan Pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/ bendahara khusus dan/atau PPTK.
4. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektifitas penatausahaan keuangan SKPD.

V Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA. PA menetapkan PPK unit untuk meningkatkan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD.
2. PPK unit SKPD merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
3. Jika tidak terdapat pejabat struktural pada unit SKPD maka PPK pada unit skpd dapat dirangkap langsung oleh PPK-SKPD.
4. Kepala unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK unit SKPD.

VI Bendahara

1. Bendahara Penerimaan
 - a. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atas usul PPK selaku BUD.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

- b. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD yang bersangkutan diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD.
 - c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
 - d. Kepala SKPD atas usul Bendahara penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendaharan penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelola pendapatan daerah.
2. Bendahara Pengeluaran
 - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Kepala Daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
 - c. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu, didasarkan atas pertimbangan:
 1. Besaran Anggaran.
 2. Rentang kendali dan/atau lokasi.
 - d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara administratif dan fungsional.
 - e. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Belanja dan/atau pengeluaran Pembiayaan.
 3. Syarat bendahara
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 syarat bendahara adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri;
 - b. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - c. Golongan minimal II/b atau sederajat; atau
 - d. Mempunyai sertifikat bendahara (kalau ada);
 4. Untuk menampung pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari BP ke BPP, Kepala SKPD mengajukan surat ijin pembukaan rekening kepada Wali Kota melalui BPKPD sebagai dasar pembuatan rekening penampung pelimpahan UP yang akan dikelola oleh BPP di Bank yang sama dengan Bank Penempatan Rekening Kas Umum Daerah (Bank Nagari).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|----------------|
| I | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | OP | Rp200.000,00 |
| II | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa | | |
| 1 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) | | |
| | Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta | OP | Rp680.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta | OP | Rp850.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar | OP | Rp1.020.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2. 5 miliar | OP | Rp1.270.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 2.5 s.d. 5 miliar | OP | Rp1.520.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar | OP | Rp1.780.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | OP | Rp2.120.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | OP | Rp2.450.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s.d. 75 miliar | OP | Rp2.790.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 75 miliar s.d. 100 miliar | OP | Rp3.130.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 100 miliar s.d. 250 miliar | OP | Rp3.580.000,00 |
| 2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) | | |
| | Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta | OP | Rp760.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta | OP | Rp760.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar | OP | Rp920.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2.5 miliar | OP | Rp1.140.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 2.5 s. d. 5 miliar | OP | Rp1.370.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar | OP | Rp1.600.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar | OP | Rp1.910.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar | OP | Rp2.210.000,00 |
| 3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) | | |
| | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. 50 juta | OP | Rp450.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 s.d. 100 juta | OP | Rp450.000,00 |
| | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 juta | OP | Rp450.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

| | | |
|--|----|----------------|
| Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 100 juta s.d. 250 juta | OP | Rp480.000,00 |
| Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 250 juta s.d. 500 juta | OP | Rp600.000,00 |
| Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 500 juta s.d. 1 miliar | OP | Rp720.000,00 |
| Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 1 miliar s.d. 2.5 miliar | OP | Rp910.000,00 |
| Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 2.5 miliar s.d. 5 miliar | OP | Rp1.090.000,00 |
| Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas 5 miliar s.d 10 miliar | OP | Rp1.270.000,00 |

Catatan:

1. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Honorarium Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka honorarium tersebut dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja UKPBJ setelah menjalankan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
4. Untuk fungsional umum yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat dibayarkan honorarium sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|----------------------------|--------|----------------|
| 1 | Kepala | OB | Rp1.000.000,00 |
| 2 | Sekretaris/ Staf Pendukung | OB | Rp750.000,00 |

Catatan:

1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 17 -

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|----------|--------------------------------|
| 1 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli - Saksi Ahli - Saksi Biasa | OK OK | Rp1.800.000,00 Rp400.000,00 |
| 2 | Honorarium Beracara | OK | Rp1.800.000,00 |

Catatan:

1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
2. Saksi biasa merupakan Saksi memberikan keterangan berdasarkan sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Saksi Ahli memberikan keterangannya berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
4. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
5. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

5. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|--------|----------------|
| I | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| 1 | Pembina | OB | Rp3.500.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18 -

| | | | |
|----|--|----|----------------|
| 2 | Pengarah | OB | Rp3.000.000,00 |
| 3 | Ketua | OB | Rp2.500.000,00 |
| 4 | Wakil Ketua | OB | Rp2.000.000,00 |
| 5 | Sekretaris | OB | Rp1.500.000,00 |
| 6 | Anggota: | | |
| | - Pembahas | OB | Rp1.300.000,00 |
| | - Pengolah Data | OB | Rp600.000,00 |
| II | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| 1 | Ketua | OB | Rp1.000.000,00 |
| 2 | Sekretaris | OB | Rp900.000,00 |
| 3 | Anggota | OB | Rp600.000,00 |

Catatan:

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

6. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---|--------|----------------|
| | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| I. | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| 1. | Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | | |
| a. | Pengarah | OB | Rp1.500.000,00 |
| b. | PenanggungJawab | OB | Rp1.250.000,00 |
| c. | Ketua | OB | Rp1.000.000,00 |
| d. | Wakil ketua | OB | Rp850.000,00 |
| e. | Sekretaris | OB | Rp750.000,00 |
| f. | Anggota | OB | Rp750.000,00 |
| 2. | Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | | |
| a. | Pengarah | OB | Rp750.000,00 |
| b. | PenanggungJawab | OB | Rp700.000,00 |
| c. | Ketua | OB | Rp650.000,00 |
| d. | Wakil ketua | OB | Rp600.000,00 |
| e. | Sekretaris | OB | Rp500.000,00 |
| f. | Anggota | OB | Rp500.000,00 |
| II. | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| 1. | Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 19 -

| | | | |
|----|-------------------|----|--------------|
| a. | Ketua/Wakil Ketua | OB | Rp250.000,00 |
| b. | Anggota | OB | Rp220.000,00 |

Catatan:

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah.
2. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud. Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

| No | Jabatan | Klasifikasi | | |
|----|--|-------------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1 | Pejabat Eselon I dan Eselon II | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Pejabat Eselon III | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional | 5 | 6 | 7 |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - b. Klasifikasi II dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - c. Klasifikasi III dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.
 4. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 20 -

- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari ; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

5. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

7. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|----------------------|--------------|
| | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN | | |
| 1. | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar | | |
| | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | Rp100.000,00 |
| | b. Pengawas Ujian | OH | Rp100.000,00 |
| | c. Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp2.500,00 |
| 2. | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah | | |
| | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah / Pelajaran | Rp100.000,00 |
| | b. Pengawas Ujian | OH | Rp100.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 21 -

| | | | |
|----|---|----------------------|--------------|
| | c. Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp3.500,00 |
| 3. | Jasa Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTS. | | |
| | a. Jasa Memindai Jawaban Komputer | Lbr | Rp12.000,00 |
| | b. Jasa Penulisan Ijazah/SHU | Lbr | Rp10.000,00 |
| | c. Jasa perakit soal | Mapel | Rp250.000,00 |
| | d. Jasa pengawas ruang / ujian | OH | Rp100.000,00 |

Catatan:

1. Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian. pengawas ujian. penguji. atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
2. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.
3. pemberian honorarium pemeriksa ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.
Pada tingkat pendidikan dasar honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

8. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PELATIHAN/DIKLAT

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---|--------|--|
| 1. | Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | Rp300.000,00 |
| 2. | Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | Rp200.000,00 |
| | A. Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan | | |
| | 1. Kontribusi | | Disesuaikan Dengan ketentuan Penyelenggara |
| | 2. Ledies Program | | Disesuaikan Dengan ketentuan Penyelenggara |
| | 3. Bantuan Biaya Pendidikan | | |
| | - Diklat PIM II | OK | Rp10.000.000,00 |
| | - Diklat PIM III | OK | Rp7.000.000,00 |
| | - Diklat PIM IV | OK | Rp5.000.000,00 |
| | 4. Diklat PIM II diluar Provinsi Sumbar | | Diberikan Tambahan Biaya |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 22 -

| | | | Transportasi Sesuai standar biaya yang ditetapkan |
|--|---|----|--|
| | <i>B. Penyelenggaraan Diklat</i> | | |
| | 1. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat | | |
| | a. Lama Diklat s.d 5 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp450.000,00 |
| | 2) Ketua/Wakil Ketua | OK | Rp400.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp300.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp300.000,00 |
| | b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp675.000,00 |
| | 2) Ketua/Wakil Ketua | OK | Rp600.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp450.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp450.000,00 |
| | c. Lama Diklat lebih dari 30 hari | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp900.000,00 |
| | 2) Ketua/Wakil Ketua | OK | Rp800.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp600.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp600.000,00 |

Catatan:

1. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara: Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
2. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara: Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 23 -

Keterangan:

OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OH : Orang/Hari
Lbr : Lembar
Mapel : Mata Pelajaran
OJP : Orang/Jam/Pelajaran

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 24 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR BIAYA BELANJA JASA

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

1. belanja jasa administrasi kantor/tenaga harian lepas/sopir/non pns lainnya;
2. belanja operasional;
3. belanja jasa narasumber;
4. jasa tim penilai, wasit dan sejenisnya;
5. hadiah/lomba/penghargaan;
6. jasa pelayanan kesehatan;
7. biaya transportasi;
8. perjalanan dinas khusus;
9. jasa petugas upacara hut ri dan hari besar nasional lainnya tingkat kota dan kecamatan;
10. jasa publikasi;
11. belanja perencanaan pembuatan desain, bestek, gambar;
12. satuan biaya konsumsi rapat;
13. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur; dan
14. Insentif pendidik dan tenaga pendidik (PTK) Non ASN jenjang SD dan SMP.

1. BELANJA JASA ADMINISTRASI KANTOR/TENAGA HARIAN LEPAS/SOPIR/NON PNS LAINNYA

| No. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|--|--------|----------------|
| 1. | Tenaga Non ASN | | |
| | Administrasi Kantor pada organisasi perangkat daerah sesuai jenjang pendidikan: | | |
| | 1. S1 | OB | Rp2.300.000,00 |
| | 2. D3 | OB | Rp2.000.000,00 |
| | 3. SLTA Kebawah | OB | Rp1.700.000,00 |
| | | | |
| 1. | Sespri Wali Kota/Wakil Wali Kota/Tenaga Ahli | OB | Rp3.000.000,00 |
| 2. | Sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sopir Sekda. | OB | Rp2.800.000,00 |
| 3. | Sespri Sekda, Sespri Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD | OB | Rp2.000.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 25 -

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|
| 4. | Sopir Ketua PKK, Sopir Ketua GOW, Sopir DW, Ajudan Ketua DPRD. | OB | Rp1.800.000,00 |
| 5. | Tenaga Harian Pengangkut Sampah Dengan Truk, Sopir Pada organisasi perangkat daerah dan Sopir Pool Umum | OH | Rp60.000,00 |
| 6. | Tenaga Kebersihan pada OPD, Jalan dan Taman <7,5 jam | OH | Rp50.000,00 |
| 7. | Petugas Pemilihan Induk dan Bibit Ikan | OH | Rp50.000,00 |
| 8. | Tenaga Pramusaji Rumah Dinas/Jabatan | OB | Rp2.000.000,00 |
| 9. | Pengelola Tempat Penitipan Anak dan Penjaga Pustaka | OH | Rp40.000,00 |
| 10. | Tenaga Kebersihan/K3, Satpam, Sopir, Tukang Masak, Pramusaji, Pramucuci Pada RSUD Sadikin | OH | Rp60.000,00 |
| 11. | Jasa petugas pengasapan/fogging | OH | Rp100.000,00 |
| Sekretariat DPRD | | | |
| 12. | Tenaga Ahli Fraksi | OB | Rp2.500.000,00 |
| 13. | Staf Ahli Fraksi DPRD | OB | Rp1.500.000,00 |
| UPT Air Bersih Dinas PERKIMLH | | | |
| 14. | Petugas Operasional WTP Cubadak Mentawai | | |
| | a. S.1 | OB | Rp2.300.000,00 |
| | b. D3 | OB | Rp2.000.000,00 |
| | c. SMA | OB | Rp1.700.000,00 |
| 15. | Tenaga Teknis Operasional WTP Cubadak Mentawai | Orang Malam | Rp65.000,00 |
| 16. | Petugas Pencatat Meteran Air | 100 SR | Rp60.000,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | |
| 17. | Operator dan Pengamanan Kapal Cepat | OH | Rp30.000,00 |
| 18. | Tim TRC BPBD NON PNS | OB | Rp2.000.000,00 |
| Dinas Perhubungan | | | |
| 19. | Operator Petugas Lapangan Pengendali Lalu Lintas | OB | Rp2.000.000,00 |
| 20. | Operator Pengawas Bidang Angkutan Laut | OB | Rp2.000.000,00 |
| 21. | Petugas Pemungut Retribusi Parkir | OB | Rp2.000.000,00 |
| 22. | Sopir Bus Sekolah | OB | Rp1.500.000,00 |
| 23. | Kondektur Bus Sekolah | OB | Rp1.250.000,00 |
| Dinas Pariwisata | | | |
| 24. | Petugas Penjaga Pulau | OB | Rp2.500.000,00 |
| 25. | Petugas Pramuwisma Villa/Cottage Pulau | OB | Rp1.500.000,00 |
| 26. | Petugas Retribusi Pariwisata | OB | Rp1.700.000,00 |
| 27. | Petugas Pengawas/Penjaga Aset (Pariwisata) | OB | Rp1.700.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 26 -

| | | | |
|-----|---|---------------------|-----------------|
| 28. | Jasa penampilan kesenian dalam daerah | | |
| | a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang | Kelompok/ tampil | Rp3.500.000,00 |
| | b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang | Kelompok/ tampil | Rp3.000.000,00 |
| | c. Tampilan silek maksimal 10 orang | Kelompok/ tampil | Rp1.500.000,00 |
| | d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang | Kelompok/ tampil | Rp1.000.000,00 |
| | e. Jasa Cik Uniang | Orang/Keg | Rp200.000,00 |
| | f. Jasa Cik Ajo | Orang/Keg | Rp150.000,00 |
| 29. | Jasa penampilan kesenian dalam provinsi | | |
| | a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang | Kelompok/ tampil | Rp7.000.000,00 |
| | b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang | Kelompok/ tampil | Rp6.000.000,00 |
| | c. Tampilan silek maksimal 10 orang | Kelompok/ tampil | Rp3.000.000,00 |
| | d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang | Kelompok/ tampil | Rp2.000.000,00 |
| | e. Jasa Cik Uniang | Orang/Keg | Rp400.000,00 |
| | f. Jasa Cik Ajo | Orang/Keg | |
| 30. | Jasa penampilan kesenian luar provinsi | | Rp300.000,00 |
| | a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 org | Kelompok/ tampil | |
| | b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang | Kelompok/ tampil | |
| | c. Tampilan silek maksimal 10 orang | Kelompok/ tampil | Rp35.000.000,00 |
| | d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang | Kelompok/ tampil | Rp30.000.000,00 |
| | e. Jasa Cik Uniang | Orang/Keg | Rp3.000.000,00 |
| | f. Jasa Cik Ajo | Orang/Keg | Rp2.500.000,00 |
| | Catatan: Pembayaran paket untuk Jasa penampilan kesenian luar provinsi merupakan batas maksimal, untuk pelaksanaan dihitung kembali sesuai kebutuhan | | |
| 31. | a. Jasa pendukung Operasional Sound system | | |
| | 1. Pemain keyboard | Orang | Rp250.000,00 |
| | 2. Penyanyi | Orang | Rp150.000,00 |
| | 3. Tekhnisi sound | Orang | Rp150.000,00 |
| | 4. Kuli angkut | Orang | Rp100.000,00 |
| | b. Jasa penampilan pariaman culture every week | | |
| | 1. Jasa penampilan seni | Paket | Rp1.000.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 27 -

| | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| | 2. Jasa pendukung penampilan seni (Operasional Sound dll) | Paket grup | Rp500.000,00 |
| | c. Jasa penampilan permainan anak nagari | | Rp2.500.000,00 |
| | 1. Jasa pendukung penampilan permainan anak nagari | | |
| 32. | Jasa Instruktur Senam. | Orang /Tampil | Rp200.000,00 |
| <p>Catatan:</p> <p>a. Untuk Instruktur Senam yang berasal dari luar Kota Pariaman dapat diberikan uang transportasi sebesar. Rp150.000,00/kali tampil.</p> <p>b. Jumlah instruktur maksimal 2 (dua) Orang/tampil.</p> | | | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | | | |
| 33. | Operator Mobile Community Acces Point (MCAP) | | |
| | - SMA | OB | Rp1.700.000,00 |
| | - D3 | OB | Rp2.000.000,00 |
| | - S1 | OB | Rp2.300.000,00 |
| 34. | Programer Senior | OB | Rp4.000.000,00 |
| 35. | Programer Junior | OB | Rp3.000.000,00 |
| 36. | Database Administrator | OB | Rp3.500.000,00 |
| 37. | Tenaga IT Support | OB | Rp2.800.000,00 |
| 38. | Pengelola Media Center | OB | Rp2.800.000,00 |
| 39. | <i>Pengelola Jaringan LAN</i> | | |
| | - Teknisi Strata 1/ Sederajat | OB | Rp2.800.000,00 |
| | - Teknisi Diploma 3 | OB | Rp2.300.000,00 |
| | - Teknisi SMA/ Sederajat | OB | Rp2.100.000,00 |
| | Jasa Tenaga Ahli Sistem Analis | OB | Rp5.000.000,00 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah | | | |
| 40. | Honorarium Petugas Building Development Center (BDC) Non ASN | OB | Rp200.000,00 |
| 41. | Teknisi Pasar Pariaman | | |
| | Teknisi Strata 1 | OB | Rp2.800.000,00 |
| | Teknisi Diploma III | OB | Rp2.600.000,00 |
| | Teknisi SMA/ Sederajat | OB | Rp2.300.000,00 |
| Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | | | |
| 42. | Jasa Petugas Bantuan Pol-PP dan Damkar | OB | Rp2.000.000,00 |
| | Bagian Kesos | | |
| 43. | Imam Mushalla Komplek Balaikota | OB | Rp2.000.000,00 |
| 44. | Penceramah Wirid Bulanan PNS | Orang Wirid | Rp1.000.000,00 |
| 45. | Penceramah Subuh keg Subuh Berkah | OK | Rp200.000,00 |
| 46. | Guru MDTW/MDTU | OB | Rp500.000,00 |
| 47. | Jasa Mubaliqh Safari Ramadhan | OH | Rp300.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 28 -

| | Kelurahan | | |
|-----|--|--------------------|------------------------------|
| 48. | Penyuluh Agama Kelurahan | OB | Rp750.000,00 |
| 49. | Honor RT | OB | Rp500.000,00 |
| 50. | Kader Jumantik | OB | Rp100.000,00 |
| 51. | Penjaga malam | OH | Rp40.000,00 |
| 52. | Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia dan Pemberian Makan Tambahan (PMT). (untuk 16 kelurahan) | OB | Rp100.000,00 |
| 53. | Honor Dubalang | OB | Rp300.000,00 |
| 54. | Honor PSM | OB | Rp300.000,00 |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | |
| 55. | Jasa Kader KB Kelompok Ketahanan Keluarga. | | |
| | 1. PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa/Kel) | OB | Rp125.000,00 |
| | 2. Sub PPKBD Desa/kel | OB | Rp75.000,00 |
| | 3. Kader BKB (Bina Keluarga Balita) Desa/Kel | OB | Rp75.000,00 |
| | 4. Kader BKR (Bina Keluarga Remaja) Desa/Kel | OB | Rp75.000,00 |
| | 5. Kader BKL (Bina Keluarga Lansia) Desa/Kel | OB | Rp75.000,00 |
| | 6. Kader UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor) Desa /Kel | OB | Rp75.000,00 |
| | 7. Kader KB Pria Desa/Kel | OB | Rp75.000,00 |
| | 8. Klinik KB | Kelompok/ Bulan | Rp100.000,00 |
| | 9. Operasional Kelompok Ketahanan | Kelompok/ Bulan | Rp50.000,00 |
| 56. | Jasa Psikolog | Orang /kegiatan | Rp400.000,00 |
| 57. | Jasa Visum | Orang /kegiatan | Rp250.000,00 |
| 58. | Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia | Orang / Bulan | Rp100.000,00 |
| | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | | |
| 59. | Jasa Pihak Ketiga Pemungut Retribusi | | |
| | a. Tarif Retribusi Rp. 2.000 | | Rp1.000,00/50% dari tarif |
| | b. Tarif Retribusi Rp. 3.000 | | Rp1.200,00/40% dari tarif |
| | c. Tarif Retribusi Rp. 4.000 | | Rp1.600,00/40% dari tarif |
| | d. Tarif Retribusi Rp. 5.000 | | Rp2.000,00/40% |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 29 -

| | | | |
|-----|--|----------------|--|
| | | | dari tarif |
| | e. Tarif Retribusi Rp. 7.000 | | Rp2.800,00/40% dari tarif |
| | f. Tarif Retribusi Rp. 10.000 | | Rp4.000,00/40% dari tarif |
| | g. Jika tarif retribusi diatas atau dibawah Rp. 10.000 | | Jasa yang diberikan antara 40%-50% |
| 60. | Jasa kolektor PBB P2 | Lembar SPPT | Rp6.000,00 |
| 61. | Jasa kolektor / pemungut retribusi tempat khusus parkir untuk hari libur nasional | | 30 % dari tarif |
| 62. | Jasa Tenaga Pendataan Objek Pajak | Per Sampel | Rp5.000,00 |
| | UPT Gudang Farmasi | | |
| 63. | Jasa pengawalan Vaksin | Kali | Rp1.250.000,00 |
| 64. | Jasa Bongkar Muat Barang / Obat, BMHP dan Vaksin | kali | Rp100.000,00 |
| 65. | Honorarium Apoteker Penanggung Jawab | Tahun | Rp2.500.000,00 |
| | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | |
| 66. | Jasa Pemasangan Pilar / Batas tanah | Orang/Pilar | Rp50.000,00 |
| | Dinas Arsip dan Perpustakaan | | |
| 67. | Jasa Petugas Perpustakaan Keliling (Non PNS). | OH | Rp50.000,00 |
| | Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan | | |
| 68. | Medis Veteriner | OH | Rp135.000,00 |
| 69. | Paramedis Veteriner | OH | Rp110.000,00 |
| | UPT Labor Lingkungan DISPERKIMLH | | |
| 70. | Jasa / Upah Kerja Petugas Laboratorium) | | |
| | 1. Petugas / Tenaga Teknis Laboratorium (Non ASN) | | |
| | a. Analis Laboratorium | OB | Rp2.500.000,00 |
| | b. Petugas Sampling Laboratorium | OB | Rp2.500.000,00 |
| | c. Petugas Penerima Contoh Uji | OB | Rp2.500.000,00 |
| | d. Petugas Kesling dan Pengelola Limbah B3 Laboratorium | OB | Rp2.500.000,00 |
| | Teknisi peralatan Laboratorium | OB | Rp2.500.000,00 |
| | Tenaga IT dan Pelaporan | OB | Rp2.500.000,00 |
| | 2. Petugas Kebersihan Laboratorium | OB | Rp1.500.000,00 |
| 71. | Jasa Medik / Jasa Layanan Petugas Laboratorium | | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 30 -

| | | | |
|--|---|------------|----------------|
| | a. Penanggung jawab labling | Per sampel | Rp3.000,00 |
| | b. Manajer puncak labling | | Rp4.000,00 |
| | c. Manajer administrasi / mutu labling | Parameter | Rp3.000,00 |
| | d. Manajer teknis labling | | Rp3.000,00 |
| | e. Penyelia Analisis Labling | Sampel | Rp2.500,00 |
| | f. Penyelia sampling labling | | Rp2.500,00 |
| | g. Pj. K3 dan pengelola limbah | | Rp2.500,00 |
| | h. Analisis labling | | Rp5.000,00 |
| | i. Petugas penerima contoh uji | Per sampel | Rp2.000,00 |
| | j. Petugas sampling (dalam kota) | Per sampel | Rp15.000,00 |
| | k. Petugas sampling (luar kota) | Per sampel | Rp25.000,00 |
| | l. Petugas K3 dan Petugas limbah | | Rp2.000,00 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | | | |
| 72. | Guru Tahfidz | | |
| | d. S1 | OB | Rp1.800.000,00 |
| | e. D3 | OB | Rp1.500.000,00 |
| | f. SLTA Kebawah | OB | Rp1.200.000,00 |
| 73. | Guru pendamping khusus | | |
| | a. S1 | OB | Rp1.800.000,00 |
| | b. D3 | OB | Rp1.500.000,00 |
| | c. SLTA Kebawah | OB | Rp1.200.000,00 |
| 74. | Pesuruh Sekolah TK | | |
| | a. S1 | OB | Rp1.800.000,00 |
| | b. D3 | OB | Rp1.500.000,00 |
| | c. SLTA Kebawah | OB | Rp1.200.000,00 |
| 75. | Tim Assesment Inklusi | OH | |
| | UPTD. Metrologi Legal | | |
| 76. | Jasa Tenaga Ahli Tera SPBU | OH | Rp350.000,00 |
| 77. | Jasa Tenaga Ahli UTTP | OH | Rp250.000 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | |
| 78. | Jasa Saksi Pengambilan Sumpah Jabatan | OK | Rp500.000,00 |
| | Dinas Kesehatan | | |
| 79. | Jasa Tenaga Kontrak Perawat Anestesi/Penata Anestesi/Asisten Anestesi | OB | Rp4.500.000,00 |
| 80. | Jasa Apoteker Penanggungjawab Pengadaan Obat | Tahun | Rp2.500.000,00 |
| Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | | |
| 81. | Jasa Kader Ketenagakerjaan di Desa/Kelurahan | OB | Rp100.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 31 -

Keterangan :

untuk Tenaga Programmer, Database Administrator, Tenaga IT Support, Pengelola Jaringan LAN dan Teknisi Pasar Pariaman dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau yang disamakan dengan sertifikat keahlian.

Untuk petugas lapangan yang bekerja disiang hari tidak mendapatkan uang operasional, dan hanya dapat diberikan makan Rp. 25.000,- (Belanja Makan minum).

Untuk petugas lapangan yang bekerja dimalam hari tidak mendapatkan uang operasional, dan hanya dapat diberikan makan Rp. 35.000,- (Belanja Makan minum).

Dalam rangka pelaksanaan event-event besar seperti Pesta Pantai dan sejenisnya, dapat diberikan uang operasional sebesar Rp. 50.000,- kepada pegawai yang bertugas pada organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan BPKPD. Terhadap pegawai yang mendapatkan uang operasional, maka tidak diberikan makan.

2. BELANJA OPERASIONAL

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|---------------|----------------|
| | Belanja Operasional Polisi Pamong Praja | | |
| 1. | Belanja Jasa TNI dan Polri Pengamanan Pasar Pariaman Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan | Orang / bulan | Rp1.000.000,00 |
| 2. | Belanja Operasional petugas pemadam kebakaran kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten / kota | OK | Rp100.000,00 |
| 3. | Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Perda Secara Yustisi/Tipiring : | | |
| | a. Hakim | Orang/Hari | Rp150.000,00 |
| | b. Panitera | Orang/Hari | Rp150.000,00 |
| | c. Jaksa | Orang/Hari | Rp150.000,00 |
| | d. Korwas PPNS | Orang/Hari | Rp100.000,00 |
| | e. Penyidik | Orang/Hari | Rp150.000,00 |
| 4. | Belanja Jasa Atas Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Masa | Kali | Rp50.000,00 |
| | Catatan: | | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 32 -

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|--------|----------------|
| | SPT dalam satu hari minimal 8 jam. | | |
| | Biaya Operasional UPT. ALKAL & PJU | | |
| 5. | Biaya Operasional Operator/Sopir | | |
| | a. Mesin Gilas 2,5 Ton | Hari | Rp150.000,00 |
| | b. Mesin Gilas 7 Ton | Hari | Rp150.000,00 |
| | c. Dump Truck | Hari | Rp150.000,00 |
| | d. Excavator | Hari | Rp250.000,00 |
| | e. Buldozer | Hari | Rp250.000,00 |
| | f. Bachoe Loader | Hari | Rp200.000,00 |
| | g. Motor Greder | Hari | Rp250.000,00 |
| | h. Mini Excavator | Hari | Rp250.000,00 |
| | i. Truck Sky Lift | Hari | Rp250.000,00 |
| | | | |
| 6. | Belanja jasa insentif tenaga pembantu operasional pimpinan: | | |
| | a. Ajudan Wali Kota | OB | Rp1.400.000,00 |
| | b. Ajudan Wakil Wali Kota | OB | Rp1.200.000,00 |
| | Catatan: - Dibayarkan hanya untuk tenaga pembantu operasional pimpinan yang berasal dari TNI/Polri dan Instansi Pemerintah lainnya. - Bagi tenaga pembantu operasional pimpinan yang menerima belanja jasa tenaga operasional pimpinan, tidak diberikan uang lembur. | | |
| | | | |
| 7. | Biaya Operasional Petugas Pemungut Retribusi | OH | Rp50.000,00 |
| 8. | Jasa Pengamanan (PATWAL) | | |
| | a. Dalam Kota | Kali | Rp400.000,00 |
| | b. Luar Kota Dalam Propinsi | Kali | Rp1.000.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 33 -

3. BELANJA JASA NARASUMBER

I. Jasa Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Luar Provinsi.

| No | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|----------------|
| 1. | Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya | OJ | Rp1.700.000,00 |
| 2. | Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | OJ | Rp1.400.000,00 |
| 3. | Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | OJ | Rp1.200.000,00 |
| 4. | Pejabat Eselon II /yang disetarakan | OJ | Rp1.000.000,00 |
| 5. | Pejabat Eselon III /yang disetarakan | OJ | Rp900.000,00 |
| 6. | Pejabat Eselon IV/Staf dan yang disetarakan | OJ | Rp800.000,00 |
| 7. | Jasa Pendamping/Asisten Narasumber Luar Provinsi | OJ | Rp250.000,00 |
| 8. | Honorarium Moderator | OK | Rp600.000,00 |
| 9. | Honorarium Pembawa Acara | OK | Rp400.000,00 |

II. Jasa Narasumber, Pembahas, Fasilitator, Sosialisasi, Diklat dan Sejenisnya dalam Propinsi.

| No | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|------------------------------------|--------|----------------|
| 1. | Pembahas | | |
| | a. Wali Kota | OJ | Rp1.400.000,00 |
| | b. Wakil Wali Kota | OJ | Rp1.200.000,00 |
| | c. Sekretaris Daerah | OJ | Rp1.000.000,00 |
| | d. Pejabat Eselon II | OJ | Rp700.000,00 |
| | | | |
| 2. | Jasa Narasumber Dalam Propinsi | | |
| | a. Setara Eselon II | OJ | Rp700.000,00 |
| | b. Setara Eselon III kebawah | OJ | Rp500.000,00 |
| | c. Guru Besar | OJ | Rp500.000,00 |
| | d. Doktor (S3) | OJ | Rp450.000,00 |
| | e. S2 | OJ | Rp400.000,00 |
| | | | |
| 3. | Jasa Pendamping/Asisten Narasumber | OJ | Rp250.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 34 -

| | dalam Provinsi | | |
|----|--|--------|--------------|
| 4. | Moderator | Materi | Rp250.000,00 |
| 5. | MC | Acara | Rp200.000,00 |
| 6. | Pembaca Do'a/Kitab Suci/Rohaniwan | Acara | Rp150.000,00 |
| 7. | Pemimpin Lagu | Acara | Rp150.000,00 |
| 8. | MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Kota Pariaman | Acara | Rp500.000,00 |
| 9. | MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Provinsi dan Nasional | Acara | Rp750.000,00 |

1. Jasa Narasumber atau Pembahas

Jasa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discution, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan jasa sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar Kota Pariaman dalam provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi 150.000,-.
- e. Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

2. Honorarium Moderator

Jasa moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 35 -

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Jasa Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, rkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. JASA TIM PENILAI, WASIT DAN SEJENISNYA

| No | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Untuk Perlombaan Tingkat Kecamatan | | |
| | a. Tim Penilai Perlombaan/ Juri | Orang/Lomba | Rp250.000,00 |
| 2. | Untuk Perlombaan Tingkat Kota. | | |
| | 1. Tim Penilai makalah | Orang / makalah | Rp100.000,00 |
| | 2. Tim Penilai perlombaan/ Juri | Orang/Lomba | Rp500.000,00 |
| | 3. Wasit | Orang / Pertandingan | Rp250.000,00 |
| 2. | Untuk perlombaan tingkat Propinsi. | | |
| | 1. Tim Penilai makalah | Orang / makalah | Rp200.000,00 |
| | 2. Tim Penilai perlombaan/ Juri | Orang/Lomba | Rp750.000,00 |
| | 3. Wasit | Orang / Pertandingan | Rp350.000,00 |
| 3. | Untuk perlombaan tingkat Nasional | | |
| | 1. Tim Penilai makalah | Orang / makalah | Rp300.000,00 |
| | 2. Tim Penilai perlombaan/ Juri | Orang/Lomba | Rp1.000.000,00 |
| | 3. Wasit | Orang / Pertandingan | Rp450.000,00 |

Catatan:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 36 -

- a. Untuk Tim Penilai/Wasit dari luar Kota Pariaman dalam provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi Rp. 150.000,-
- b. Untuk Tim Penilai/Wasit dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

5. HADIAH/LOMBA/PENGHARGAAN

Untuk besaran Hadiah/Lomba/Penghargaan diatur lebih lanjut dalam SK masing-masing OPD.

6. JASA PELAYANAN KESEHATAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|-----------|-----------------|
| 1. | Jasa Tenaga Dokter Spesialis | | |
| | 1. Dokter Spesialis | OB | Rp15.000.000,00 |
| | 2. Dokter Spesialis Referral | Kunjungan | Rp1.250.000,00 |
| 2. | Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Jaga Malam | | |
| | 1. Dokter | OH | Rp135.000,00 |
| | 2. Perawat / Bidan | OH | Rp110.000,00 |
| | 3. Tenaga Kesehatan Lainnya | OH | Rp85.000,00 |
| | 4. Penata Anastesi | OH | Rp100.000,00 |
| | 5. Petugas Rontgen | OH | Rp100.000,00 |
| | 6. Sopir / Satpam | OH | Rp80.000,00 |
| 3. | Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Sore Hari Libur | | |
| | 1. Dokter | OH | Rp125.000,00 |
| | 2. Perawat / Bidan | OH | Rp100.000,00 |
| | 3. Tenaga Kesehatan Lainnya | OH | Rp100.000,00 |
| | 4. Penata Anastesi | OH | Rp100.000,00 |
| | 5. Petugas Rontgen | OH | Rp100.000,00 |
| | 6. Sopir / Satpam | OH | Rp80.000,00 |
| 4. | Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi | | |
| | 1. Biaya sewa mobilitas darat | Unit | Rp500.000,00 |
| | 2. Jasa tenaga pemasangan alkon | Orang | Rp100.000,00 |
| | 3. Transportasi akseptor | Orang | Rp30.000,00 |
| | 4. Transportasi tenaga KIE/pendamping | Orang | Rp30.000,00 |
| | 5. Jasa cabut implant | Orang | Rp50.000,00 |
| | 6. Jasa kegagalan/komplikasi | Kasus | Rp400.000,00 |
| 5. | Jasa Referral Petugas Proteksi Radiasi / PPR (RSUD) | | |
| | Radiografer memiliki SIB PPR | OB | Rp500.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 37 -

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|--------------|
| 6. | Belanja paket data dan laporan Covid-19 dan BIDAN | | |
| | Belanja paket data dan laporan Covid-19 dan BIAN | Bulan | Rp100.000,00 |

7. BIAYA TRANSPORTASI

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Penggantian Transportasi Muspika (Kapolsek & Danramil dan anggota) | OH | Rp100.000,00 |
| 2. | Transportasi peliput awak media cetak, online, elektronik dan televisi | OH | Rp100.000,00 |
| 3. | Biaya transportasi petugas pengukuran tanah | OK | Rp100.000,00 |
| 4 | Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran | OH | Rp150.000,00 |
| 5. | Biaya Transportasi Sidang KAN. | | |
| | 1. Ketua | Orang Sidang | Rp100.000,00 |
| | 2. Wakil Ketua | Orang Sidang | Rp75.000,00 |
| | 3. Sekretaris/Bendahara | Orang Sidang | Rp60.000,00 |
| | 4. Anggota | Orang Sidang | Rp50.000,00 |
| 6. | Biaya Transportasi Sidang LKAAM dan Bundo Kandung. | | |
| | 1. Ketua | Orang Sidang | Rp150.000,00 |
| | 2. Wakil Ketua | Orang Sidang | Rp100.000,00 |
| | 3. Sekretaris | Orang Sidang | Rp100.000,00 |
| | 4. Bendahara | Orang Sidang | Rp100.000,00 |
| | 5. Anggota | Orang Sidang | Rp75.000,00 |
| 7. | Jasa Transportasi Petugas / Pekerja Sosial yang melakukan pelayanan dan penanganan program kesejahteraan sosial | OB | Rp500.000,00 |
| 8. | Transportasi darat untuk Non PNS | OH | Rp50.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 38 -

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---|--------|--------------|
| 9. | Transportasi Narasumber / Wasit / Pelatih dari luar kota pariaman dalam propinsi sumbar | OH | Rp150.000,00 |
| 10. | Transportasi penggerek bendera Upacara Hari Besar Lainnya | OH | Rp75.000,00 |
| 11. | Trasportasi Pelatih | OH | Rp100.000,00 |
| 12. | Transportasi peserta lomba ke propinsi | OH | Rp100.000,00 |
| 13. | Transportasi Khusus Tim Safari Ramadhan | | |
| | a. Ketua Tim Forkopimda | OH | Rp150.000,00 |
| | b. Qori / Qori'ah | OH | Rp150.000,00 |

Catatan:

1. Transportasi darat dalam kota pariaman diberikan secara *lumpsum*.
2. Transportasi darat untuk Non PNS diberikan kepada:
 - a. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan SKPD, untuk mensukseskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan, penjaga stand pameran atau sejenisnya milik pemerintah, yang dilaksanakan dalam kota pariaman.
3. Transportasi untuk Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran diberikan sekali dalam setahun saat Upacara HUT RI.

8. PERJALANAN DINAS KHUSUS

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|--------|---|
| 1 | Belanja Perjalanan Dinas Instansi Vertikal (BPKP, KPKNL) | OH | Dibayarkan sesuai standar perjalanan dinas instansi yang bersangkutan |

9. JASA PETUGAS UPACARA HUT RI DAN HARI BESAR NASIONAL LAINNYA TINGKAT KOTA DAN KECAMATAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|--------------|
| 1. | Jasa Petugas Medis | OK | Rp125.000,00 |
| 2. | Jasa Petugas Perwira Upacara | OK | Rp150.000,00 |
| 3. | Jasa Komandan Upacara Peringatan Hari Besar Lainnya | OK | Rp100.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 39 -

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|--------|--------------|
| 4. | Jasa Petugas Pembaca UUD, Kori, Tri Brata, Sapta Marga | OK | Rp100.000,00 |
| 5. | Jasa Pelatih Upacara Hari Besar Lainnya | OK | Rp150.000,00 |
| 6. | Transportasi Penggerek Bendera Hari Besar Lainnya | OK | Rp75.000,00 |
| 7. | Transportasi Korsik Hari Besar Lainnya | OK | Rp50.000,00 |

10. JASA PUBLIKASI

| No | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Jasa Penyiar Radio | | |
| | 1. Koordinator Penyiar | OB | Rp2.000.000 |
| | 2. Penyiar Radio | Org/Jam | Rp25.000,00 |
| | <i>Catatan:</i> Penyiar bekerja setiap hari dari jam 05.WIB s/d 22.00 WIB | | |
| 2. | Belanja Publikasi Media Elektronik LPP TVRI | | |
| | Disesuaikan dengan PP NO. 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Peraturan Kepala LPP TVRI Sumbar tentang Standar Biaya Produksi Program Acara (Dialog Khusus/Liputan Khusus/Advertorial/Iklan dll). | | |
| 3. | Belanja Publikasi Media Elektronik Radio Swasta | | |
| | 1. Biaya Produksi ILM/Imbauan/Greeting | Kali | Rp250.000,00 |
| | 2. Tarif pemutaran ILM/Imbauan/Greeting | Spot | Rp50.000,00 |
| 4. | Biaya Produksi Video Dokumenter (Pihak Ketiga) | | |
| | 1. Kameramen | OB | Rp800.000,00 |
| | 2. Editor | OB | Rp800.000,00 |
| 5. | Belanja Jasa Liputan Wartawan Ramadhan | | |
| | 1. Media Online, Cetak dan Elektronik (Radio) | Orang/Berita | Rp100.000,00 |
| | 2. Media Televisi | Orang/Berita | Rp250.000,00 |

11. BELANJA PERENCANAAN PEMBUATAN DESAIN, BESTEK, GAMBAR

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|------------|--------------------|---------|
| 1. | Pagu Dana: | Biaya perencanaan: | |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 40 -

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | < Rp. 50.000.000 | 4% | (Maksimal Rp2.000.000,00) |
| | > Rp. 50.000.000 ≤ Rp. 200.000.000 | 4% | (maksimal Rp8.000.000,00) |
| | > Rp. 200.000.000 ≤ Rp. 500.000.000 | 3% | (maksimal Rp15.000.000,00) |
| | > Rp. 500.000.000 | Maksimal 3% | |

12. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|--------|-------------|
| 1. | RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA | | |
| | MAKAN | Orang | Rp75.000,00 |
| | KUDAPAN (SNACK) | Orang | Rp25.000,00 |
| 2. | RAPAT BIASA | | |
| | MAKAN | Orang | Rp22.000,00 |
| | KUDAPAN (SNACK) | Orang | Rp13.000,00 |
| 3. | RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD | | |
| | Makan - Nasi Kotak 2 protein | Orang | Rp35.000,00 |
| | Snack | Orang | Rp20.000,00 |

Catatan:

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Untuk makan minum rapat kelengkapan DPRD tidak berlaku untuk sekretariat DPRD.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 41 -

13. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

| No | URAIAN | BESARAN | |
|----|--------------|-----------------|----------------------------|
| 1. | Lama Lembur | Uang Lembur | Uang Makan |
| | > 2 Jam/Hari | Rp15.000,00/Jam | - |
| | > 4 jam | Rp15.000,00/Jam | Rp25.000,00/Hari lembur |

Catatan:

- Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
- Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
- Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja.
- Terhadap pegawai yang ditugaskan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dapat diberikan lembur maksimal 8 (delapan) jam. Pemberian lembur dimaksud dilakukan secara sangat selektif.
- Terhadap pegawai yang bekerja secara applausan/shifting tidak dapat diberikan lembur.
- Kegiatan yang sudah diberikan honorarium tim tidak dapat diberikan uang lembur.

14. INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK (PTK) NON ASN JENJANG SD DAN SMP

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|--------|--------------|
| 1. | Insentif pendidik dan tenaga pendidik (PTK) Non ASN jenjang SD dan SMP | | |
| | a. Guru | OB | Rp650.000,00 |
| | b. Operator | OB | Rp550.000,00 |
| | c. Tata Usaha | OB | Rp400.000,00 |
| | d. Pustakawan | OB | Rp350.000,00 |
| | e. Penjaga sekolah | OB | Rp300.000,00 |
| | f. Satpam | OB | Rp300.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 42 -

Keterangan:

OB : Orang/Bulan
OH : Orang/Hari
OK : Orang/Kegiatan
OJ : Orang/Jam

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ROBERIA', written in a cursive style.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 43 -

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN

Belanja Pemeliharaan terdiri dari:

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri;
2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pejabat, Kendaraan Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan Peralatan Lainnya; dan
3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|--------------|
| I | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI | | |
| 1 | GEDUNG BERTINGKAT | METER | Rp182.000,00 |
| 2 | GEDUNG TIDAK BERTINGKAT | METER | Rp124.000,00 |
| 3 | HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR | METER | Rp10.000,00 |

Keterangan:

1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 44 -

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pejabat, Kendaraan Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan Peralatan Lainnya

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|------------|-----------------|
| 1. | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat | | |
| | a. Kepala Daerah dan Ketua DPRD | Unit/Tahun | Rp45.670.000,00 |
| | b. Wakil Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD | Unit/Tahun | Rp44.010.000,00 |
| | c. Pejabat Eselon II | Unit/Tahun | Rp40.000.000,00 |
| 2. | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | | |
| | a. Roda Sepuluh | Unit/Tahun | Rp42.000.000,00 |
| | b. Roda Enam | Unit/Tahun | Rp37.000.000,00 |
| | c. Roda Empat | Unit/Tahun | Rp32.000.000,00 |
| | d. Double Gardan | Unit/Tahun | Rp37.000.000,00 |
| | e. Roda Dua | Unit/Tahun | Rp4.000.000,00 |
| | f. Speed Boat | Unit/Tahun | Rp20.240.000,00 |
| 3 | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan Peralatan Lainnya | | |
| | a. Becak Motor | Unit/Tahun | Rp17.400.000,00 |
| | b. Becak Dayung | Unit/Tahun | Rp750.000,00 |
| | c. Bachoe Loader | Unit/Tahun | Rp69.000.000,00 |
| | d. Mobil Sky Lift | Unit/Tahun | Rp66.500.000,00 |
| | e. Excavator | Unit/Tahun | Rp33.500.000,00 |
| | f. Excavator Mini | Unit/Tahun | Rp28.500.000,00 |
| | g. Mesin Gilas | Unit/Tahun | Rp24.304.920,00 |
| | h. Kapal Rescue Polyteline | Unit/Tahun | Rp25.400.000,00 |
| | i. Mesin Potong Rumput | Unit/Tahun | Rp8.200.000,00 |
| | j. Mesin Pencacah Kompos | Unit/Tahun | Rp4.600.000,00 |
| | k. Mesin Pencacah Plastik | Unit/Tahun | Rp4.600.000,00 |
| | l. Kapal Rescue Polyteline | Unit/Tahun | Rp56.000.000,00 |
| | m. Kapal Rescue Manta | Unit/Tahun | Rp65.000.000,00 |
| | n. Kapal Patroli | Unit/Tahun | Rp33.500.000,00 |
| | o. Perahu Dolpin | Unit/Tahun | Rp17.500.000,00 |
| | p. Perahu Aluminium | Unit/Tahun | Rp13.000.000,00 |
| | q. Perahu Karet | Unit/Tahun | Rp9.400.000,00 |
| | r. Perahu Fiber | Unit/Tahun | Rp7.600.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 45 -

| | | | |
|--|---------------|------------|-----------------|
| | s. Jetsky | Unit/Tahun | Rp15.600.000,00 |
| | t. Motor Atv | Unit/Tahun | Rp2.900.000,00 |
| | u. Chain Saw | Unit/Tahun | Rp7.700.000,00 |
| | v. Alat Selam | Unit/Tahun | Rp6.000.000,00 |
| <p>Catatan :</p> <p>Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pejabat dan Kendaraan Operasional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>Satuan biaya tersebut termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>Satuan biaya tidak diperuntukan bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. <ul style="list-style-type: none"> - Untuk rekondisi atau overhaul kendaraan dinas jabatan dan operasional disediakan di Sekretariat Daerah. - Untuk rekondisi atau overhaul kendaraan khusus dan/atau peralatan lainnya disediakan pada OPD/Unit kerja bersangkutan <p>Sebelum melakukan belanja pemeliharaan rekondisi dan/atau overhaul atas kendaraan dinas, kendaraan operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan/atau Peralatan Lainnya yang tidak tertampung pada anggaran diatas, terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Tim Penilai dan mendapat rekomendasi dari Tim Penilai atas kerusakan kendaraan dan peralatan lainnya tersebut.</p> | | | |

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|----------------|--------------|
| I | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR | | |
| 1. | Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor. | | |
| | 1. Mesin Tik Rusak Ringan | Unit Per Tahun | Rp200.000,00 |
| | 2. Faximile Rusak Ringan/Sedang | Unit Per Tahun | Rp500.000,00 |
| | 3. Faximile Rusak Berat | Unit Per Tahun | Rp750.000,00 |
| | 4. Pendingin Ruangan/AC | Unit Per Tahun | Rp500.000,00 |
| | 6. Projector | Unit Per Tahun | Rp500.000,00 |
| | 8. Kamera | Unit Per Tahun | Rp500.000,00 |
| | 9. Wireless | Unit Per Tahun | Rp500.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 46 -

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 10. Filling Kabinet | Unit Per Tahun | Rp250.000,00 |
| | 11. TV | Unit Per Tahun | Rp300.000,00 |
| | 12. HT (Handy Talky) | Unit Per Tahun | Rp300.000,00 |
| | 13. Router/Jaringan | Unit Per Tahun | Rp10.000.000,00 |
| | 14. Server | Unit Per Tahun | Rp10.000.000,00 |
| | 15. Kamera SLR | Unit Per Tahun | Rp1.500.000,00 |
| | 16. Maintenance Server | Unit Per Tahun | Rp2.000.000,00 |
| | 17. Generator Set | Unit Per Tahun | Rp5.000.000,00 |
| | 18. Brangkas | Unit per tahun | Rp1.000.000,00 |
| | 19. Layar Interaktif | Unit per tahun | Rp35.000.000,00 |
| | 20. Mesin Absensi | Unit per tahun | Rp500.000,00 |
| | 21. CCTV 8 channel | Unit per tahun | Rp400.000,00 |
| | 21. CCTV 16 channel | Unit per tahun | Rp800.000,00 |
| | 22. Mesin Pompa Air | Unit per tahun | Rp500.000,00 |
| | 23. Container | Unit per tahun. | Rp5.000.000,00 |
| | 24. Bak Sampah Permanen | Unit per tahun | Rp750.000,00 |
| | 25. Kulkas | Unit per tahun | Rp400.000,00 |
| | 26. Water Heater | Unit per tahun | Rp2.000.000,00 |
| | 27. Mesin kemasan | Unit per tahun | Rp8.500.000,00 |
| | 28. Meubeler (Meja, Kursi) | Unit per tahun | Rp100.000,00 |
| | 29. Drone | Unit per tahun | Rp1.500.000,00 |
| | 30. Alat Selam | Unit per tahun | Rp6.000.000,00 |
| | 31. Personal Computer/ Notebook | Unit per tahun | Rp730.000,00 |
| | 32. Printer | Unit per tahun | Rp690.000,00 |
| | 33. AC Split | Unit per tahun | Rp610.000,00 |
| | 34. Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit per tahun | Rp7.190.000,00 |
| | 35. Genset 75 KVA | Unit per tahun | Rp8.640.000,00 |
| | 36. Genset 100 KVA | Unit per tahun | Rp10.150.000,00 |
| | 37. Genset 125 KVA | Unit per tahun | Rp10.780.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 47 -

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|----------------|-----------------|
| | 38. Gensef 150 KVA | Unit per tahun | Rp13.260.000,00 |
| | 39. Genset 175 KVA | Unit per tahun | Rp14.810.000,00 |
| | 40. Genset 200 KVA | Unit per tahun | Rp15.850.000,00 |
| | 41. Genset 250 KVA | Unit per tahun | Rp16.790.000,00 |
| | 42. Genset 275 KVA | Unit per tahun | Rp17.760.000,00 |
| | 43. Genset 300 KVA | Unit per tahun | Rp20.960.000,00 |
| | 44. Genset 350 KVA | Unit per tahun | Rp22.960.000,00 |
| | 45. Genset 430 KVA | Unit per tahun | Rp25.620.000,00 |
| | 46. Genset 1500 KVA | Unit per tahun | Rp31.770.000,00 |
| | | | |
| 2. | Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan. | | |
| | Pemeliharaan alat medis gigi, tensimeter, cold chain, dll | Paket | Rp500.000,00 |

Keterangan:

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 48 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR BIAYA PERJALANAAN DINAS DALAM NEGERI

1. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP);
4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
5. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*);
6. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*);

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Uang Harian.

1. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut:

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|--------------|
| 1. | Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam (Khusus untuk aparat pengawasan) | OH | Rp150.000,00 |
| 2. | Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Propinsi khusus kegiatan PKK | OH | Rp50.000,00 |

Catatan:

- a. Perjalanan dinas jabatan dalam Kota Pariaman dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPPD (cukup menerbitkan SPT dengan mencantumkan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 49 -

- pembebanan biaya dan diketahui oleh pejabat instansi yang dikunjungi).
- b. Format pencantuman tanda tangan oleh pejabat instansi yang dikunjungi pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang digunakan dapat dilakukan pada bagian bawah SPT atau di bagian belakang SPT yang diterbitkan).
2. Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut:
- a. Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi.

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (RP) |
|----|---|--------|--------------|
| 1. | Wali Kota / Wakil Wali Kota, Pimpinan / Anggota DPRD | OH | Rp380.000,00 |
| 2. | Pejabat Esselon II / Yang disetarakan | OH | Rp250.000,00 |
| 3. | Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV / Yang Disetarakan | OH | Rp225.000,00 |
| 4. | Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III / Yang Disetarakan | OH | Rp200.000,00 |
| 5. | Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II | OH | Rp175.000,00 |
| 6. | Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I | OH | Rp150.000,00 |
| 7. | Non PNS | OH | Rp150.000,00 |

- b. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (RP) |
|----|---|--------|--------------|
| 1. | Wali Kota / Wakil Wali Kota, Pimpinan / Anggota DPRD | OH | Rp380.000,00 |
| 2. | Pejabat Esselon II / Yang Disetarakan | OH | Rp300.000,00 |
| 3. | Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV / Yang Disetarakan | OH | Rp275.000,00 |
| 4. | Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III / Yang Disetarakan | OH | Rp250.000,00 |
| 5. | Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II | OH | Rp225.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 50 -

| | | | |
|----|--|----|--------------|
| 6. | Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I | OH | Rp200.000,00 |
| 7. | Non PNS | OH | Rp200.000,00 |

c. Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (RP) |
|----|---|--------|--------------|
| 1. | Wali Kota / Wakil Wali Kota, Pimpinan / Anggota DPRD | OH | Rp380.000,00 |
| 2. | Pejabat Esselon II / Yang Disetarakan | OH | Rp350.000,00 |
| 3. | Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV / Yang Disetarakan | OH | Rp325.000,00 |
| 4. | Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III / Yang Disetarakan | OH | Rp300.000,00 |
| 5. | Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II | OH | Rp275.000,00 |
| 6. | Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I | OH | Rp250.000,00 |
| 7. | Non PNS | OH | Rp250.000,00 |

d. Kabupaten Kepulauan Mentawai.

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (RP) |
|----|---|--------|--------------|
| 1. | Wali Kota / Wakil Wali Kota, Pimpinan / Anggota DPRD | OH | Rp380.000,00 |
| 2. | Pejabat Esselon II / Yang Disetarakan | OH | Rp360.000,00 |
| 3. | Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV / Yang Disetarakan | OH | Rp335.000,00 |
| 4. | Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III / Yang Disetarakan | OH | Rp310.000,00 |
| 5. | Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II | OH | Rp285.000,00 |
| 6. | Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I | OH | Rp260.000,00 |
| 7. | Non PNS | OH | Rp260.000,00 |

Catatan :

- Sebagai bentuk efisiensi uang representasi dalam Propinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 51 -

- b. Untuk biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sesuai dengan Bill yang berlaku dengan nilai maksimal sebesar satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
- c. Khusus perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Padang dapat dibayarkan sesuai dengan standar biaya taxi dan dibayarkan maksimal Rp. 400.000,-
- d. Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah dalam propinsi untuk pejabat eselon II/pimpinan OPD/sopir Sekretaris Daerah, sopir Sekretariat DPRD dan sopir eselon II yang memiliki SK Wali Kota maksimal 6 hari, pejabat eselon III dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon III maksimal 5 hari, pejabat eselon IV dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon IV maksimal 4 hari dan staf maksimal 2 hari dalam satu bulan, kecuali kegiatan DAK dan ada undangan atau SPT dari OPD lain serta OPD yang memungut pajak dan retribusi. SPPD Dalam Daerah pegawai set. DPRD yang menjadi pendamping alat kelengkapan dewan menyesuaikan.
- e. Dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka kepada Forkopimda dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya di lingkungan Forkopimda setara dengan Eselon III.
- f. Dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka untuk Ketua dan Pengurus (Non ASN) organisasi tersebut diatas diatur sebagai berikut:
 - 1) ketua TP-PKK disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
 - 2) ketua GOW disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
 - 3) ketua Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda, dan LKKS disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
3. Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian sebagai berikut:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 52 -

| No. | PROVINSI | SATUAN | BESARAN | DIKLAT |
|-----|--|--------|--------------|--------------|
| | UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI | | | |
| 1. | ACEH | OH | Rp360.000,00 | Rp110.000,00 |
| 2. | SUMATERA UTARA | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 3. | RIAU | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 5. | JAMBI | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 6. | SUMATERA BARAT | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 8. | LAMPUNG | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 9. | BENGKULU | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | OH | Rp410.000,00 | Rp120.000,00 |
| 11. | BANTEN | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA | OH | Rp530.000,00 | Rp160.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | OH | Rp420.000,00 | Rp130.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR | OH | Rp410.000,00 | Rp120.000,00 |
| 17. | BALI | OH | Rp480.000,00 | Rp140.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | Rp440.000,00 | Rp130.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | OH | Rp360.000,00 | Rp110.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 26. | GORONTALO | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT | OH | Rp410.000,00 | Rp120.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 31. | MALUKU | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 33. | PAPUA | OH | Rp580.000,00 | Rp170.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT | OH | Rp480.000,00 | Rp140.000,00 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | OH | Rp480.000,00 | Rp140.000,00 |
| 36. | PAPUA TENGAH | OH | Rp580.000,00 | Rp170.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 53 -

| No. | PROVINSI | SATUAN | BESARAN | DIKLAT |
|-----|------------------|--------|--------------|--------------|
| 37. | PAPUA SELATAN | OH | Rp580.000,00 | Rp170.000,00 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | OH | Rp580.000,00 | Rp170.000,00 |

A. Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|--------------|
| 1. | Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD) | OH | Rp250.000,00 |
| 2. | Pejabat Eselon II / Anggota DPRD | OH | Rp150.000,00 |

Keterangan:

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Pengumandahan (detnserinp);
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
 - i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 54 -

- dan pembebanan perjalanan dinas.
4. Perjalanan dinas jabatan golongan menjadi:
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri dari:
 - 1). Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - 2). Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
 5. Perjalanan dinas jabatan terdiri dari atas komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya tranport;
 - c. Biaya penginapan; dan
 - d. Uang representasi perjalanan dinas.
 6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
 7. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
 8. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
 9. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau diselenggarakan di luar daerah.
 10. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 11. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
 12. Biaya Rapid Test dibebankan dalam biaya perjalanan dinas.
 13. Untuk diklat diluar propinsi Sumatera Barat standar biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. Untuk H-1, H+1 dibayarkan sebesar standar SPPD.
 - b. Hari ke-3 dan seterusnya dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas diklat.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 55 -

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| No | URAIAN | SATUAN | TARIF HOTEL | | | |
|-----|------------------|--------|---|--|--|--|
| | | | WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/ PIMPINAN DPRD | SEKRETARIS DAERAH/ ANGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN | PEJABAT ESELON III/PEJABAT FUNGSIONAL GOL IV, PEJABAT PELAKSANA GOL IV / YANG DISETARAKAN | PEJABAT ESELON IV, ESELON V/ PEJABAT FUNGSIONAL GOL III, PEJABAT PELAKSANA GOL III /II/I/ Non ASN/ YANG DISETARAKAN |
| 1. | ACEH | OH | Rp3.094.000,00 | Rp2.115.600,00 | Rp1.533.000,00 | Rp770.000,00 |
| 2. | SUMATERA UTARA | OH | Rp2.728.000,00 | Rp1.646.250,00 | Rp1.100.000,00 | Rp699.000,00 |
| 3. | R I A U | OH | Rp3.247.000,00 | Rp2.183.300,00 | Rp1.650.000,00 | Rp852.000,00 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | OH | Rp2.832.320,00 | Rp1.738.500,00 | Rp1.297.000,00 | Rp792.000,00 |
| 5. | J A M B I | OH | Rp2.850.000,00 | Rp1.845.900,00 | Rp1.225.000,00 | Rp580.000,00 |
| 6. | SUMATERA BARAT | OH | Rp2.750.000,00 | Rp1.750.000,00 | Rp1.353.000,00 | Rp701.000,00 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | OH | Rp3.510.000,00 | Rp2.466.400,00 | Rp1.955.000,00 | Rp861.000,00 |
| 8. | LAMPUNG | OH | Rp2.919.150,00 | Rp1.990.400,00 | Rp1.425.000,00 | Rp580.000,00 |
| 9. | BENGGULU | OH | Rp2.140.000,00 | Rp1.628.000,00 | Rp1.546.000,00 | Rp692.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | OH | Rp3.444.300,00 | Rp2.554.200,00 | Rp1.957.000,00 | Rp649.000,00 |
| 11. | B A N T E N | OH | Rp2.862.500,00 | Rp1.898.400,00 | Rp1.204.000,00 | Rp724.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT | OH | Rp2.851.930,00 | Rp1.790.750,00 | Rp1.201.000,00 | Rp686.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA | OH | Rp2.616.000,00 | Rp1.444.100,00 | Rp992.000,00 | Rp730.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH | OH | Rp2.916.650,00 | Rp1.850.000,00 | Rp1.201.000,00 | Rp750.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | OH | Rp2.759.350,00 | Rp1.886.500,00 | Rp1.384.000,00 | Rp845.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 56 -

| | | | | | | |
|-----|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16. | JAWA TIMUR | OH | Rp2.669.400,00 | Rp1.605.600,00 | Rp1.153.000,00 | Rp814.000,00 |
| 17. | B A L I | OH | Rp3.287.040,00 | Rp2.189.700,00 | Rp1.685.000,00 | Rp1.138.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | Rp3.062.500,00 | Rp1.986.000,00 | Rp1.418.000,00 | Rp907.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | Rp2.812.500,00 | Rp1.813.050,00 | Rp1.355.000,00 | Rp688.000,00 |
| 20. | KAL MANTAN BARAT | OH | Rp2.654.000,00 | Rp1.634.550,00 | Rp1.125.000,00 | Rp538.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | OH | Rp2.695.550,00 | Rp1.695.500,00 | Rp1.160.000,00 | Rp659.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | OH | Rp3.118.050,00 | Rp2.155.400,00 | Rp1.500.000,00 | Rp697.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | OH | Rp3.120.000,00 | Rp2.188.000,00 | Rp1.507.000,00 | Rp804.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA | OH | Rp3.120.000,00 | Rp2.188.000,00 | Rp1.507.000,00 | Rp904.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA | OH | Rp2.705.450,00 | Rp1.717.500,00 | Rp1.207.000,00 | Rp978.000,00 |
| 26. | GORONTALO | OH | Rp3.167.680,00 | Rp2.174.900,00 | Rp1.606.000,00 | Rp955.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT | OH | Rp2.853.200,00 | Rp1.858.800,00 | Rp1.344.000,00 | Rp704.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN | OH | Rp2.892.000,00 | Rp1.938.000,00 | Rp1.423.000,00 | Rp745.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH | OH | Rp2.309.000,00 | Rp2.027.000,00 | Rp1.679.000,00 | Rp951.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | OH | Rp2.779.920,00 | Rp1.801.800,00 | Rp1.297.000,00 | Rp786.000,00 |
| 31. | MALUKU | OH | Rp2.773.600,00 | Rp1.620.000,00 | Rp1.059.000,00 | Rp667.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA | OH | Rp2.766.960,00 | Rp1.729.350,00 | Rp1.160.000,00 | Rp605.000,00 |
| 33. | P A P U A | OH | Rp3.859.000,00 | Rp3.318.000,00 | Rp2.521.000,00 | Rp1.038.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT | OH | Rp3.562.240,00 | Rp2.505.750,00 | Rp2.056.000,00 | Rp967.000,00 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | OH | Rp3.562.240,00 | Rp2.505.750,00 | Rp2.056.000,00 | Rp967.000,00 |
| 36. | PAPUA TENGAH | OH | Rp3.859.000,00 | Rp3.318.000,00 | Rp2.521.000,00 | Rp1.038.000,00 |
| 37. | PAPUA SELATAN | OH | Rp5.673.000,00 | Rp4.877.000,00 | Rp3.706.000,00 | Rp1.526.000,00 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | OH | Rp5.711.000,00 | Rp4.911.000,00 | Rp3.731.000,00 | Rp1.536.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 57 -

Keterangan:

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Dikecualikan untuk perjalanan dinas di dalam Provinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
3. Biaya penginapan diberikan dalam bentuk biaya riil atau *at cost* sesuai dengan faktur terlampir yang diperlukan untuk menginap di:
 - a. Hotel.
 - b. Tempat menginap lainnya.
4. Alokasi diatas merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.
5. Apabila tarif resmi biaya penginapan yang tersedia diatas pagu maksimal, maka yang dibayarkan hanya sebesar pagu maksimal.
6. Biaya penginapan dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 58 -

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

| No | KOTA ASAL - TUJUAN | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | BISNIS | EKONOMI |
| 1. | PADANG - JAKARTA | Rp5.530.000,00 | Rp2.952.000,00 |
| 2. | PADANG - BALIKPAPAN | Rp10.942.000,00 | Rp5.369.000,00 |
| 3. | PADANG - BANDAR LAMPUNG | Rp6.439.000,00 | Rp3.380.000,00 |
| 4. | PADANG - BANDUNG | Rp6.129.000,00 | Rp3.508.000,00 |
| 5. | PADANG - BANJARMASIN | Rp9.006.000,00 | Rp4.642.000,00 |
| 6. | PADANG - BATAM | Rp8.653.000,00 | Rp4.546.000,00 |
| 7. | PADANG - BIAK | Rp16.932.000,00 | Rp8.728.000,00 |
| 8. | PADANG - DENPASAR | Rp9.049.000,00 | Rp4.888.000,00 |
| 9. | PADANG - JAYAPURA | Rp17.381.000,00 | Rp9.327.000,00 |
| 10. | PADANG - YOGYAKARTA | Rp7.969.000,00 | Rp4.000.000,00 |
| 11. | PADANG - KENDARI | Rp11.167.000,00 | Rp5.722.000,00 |
| 12. | PADANG - MALANG | Rp8.418.000,00 | Rp4.385.000,00 |
| 13. | PADANG - MANADO | Rp14.012.000,00 | Rp6.546.000,00 |
| 14. | PADANG - MATARAM | Rp9.060.000,00 | Rp4.867.000,00 |
| 15. | PADANG - MAKASSAR | Rp10.974.000,00 | Rp5.402.000,00 |
| 16. | PADANG - PONTIANAK | Rp8.193.000,00 | Rp4.460.000,00 |
| 17. | PADANG - SEMARANG | Rp7.744.000,00 | Rp3.925.000,00 |
| 18. | PADANG - SOLO | Rp7.744.000,00 | Rp4.065.000,00 |
| 19. | PADANG - SURABAYA | Rp9.199.000,00 | Rp4.364.000,00 |
| 20. | PADANG - TIMIKA | Rp16.718.000,00 | Rp8.685.000,00 |
| 21. | PADANG - PALANGKARAYA | Rp8.760.000,00 | Rp4.642.000,00 |
| 22. | PADANG - PANGKAL PINANG | Rp7.337.000,00 | Rp3.883.000,00 |

Catatan:

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk airport tax ditambah biaya bagasi maksimal 20 kg (*at cost*).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
3. Untuk satuan biaya tiket yang tidak tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini, agar mempedomani Peraturan yang lebih tinggi.
4. Dalam keadaan kondisi tertentu apabila penerbangan tidak



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 59 -

memungkinkan dari Padang maka dapat menggunakan Bandara terdekat.

5. Untuk tiket kelas Bisnis khusus untuk Pejabat Negara: (Wali Kota dan Wakil Wali Kota).
6. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (*boarding pass* untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

4. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| No | PROVINSI | SATUAN | BESARAN |
|-----|---------------------|-------------|--------------|
| 1. | ACEH | Orang/ Kali | Rp127.000,00 |
| 2. | SUMATERA UTARA | Orang/ Kali | Rp308.000,00 |
| 3. | RIAU | Orang/ Kali | Rp101.000,00 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | Orang/ Kali | Rp165.000,00 |
| 5. | JAMBI | Orang/ Kali | Rp147.000,00 |
| 6. | SUMATERA BARAT | Orang/ Kali | Rp190.000,00 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | Orang/ Kali | Rp179.000,00 |
| 8. | LAMPUNG | Orang/ Kali | Rp168.000,00 |
| 9. | BENGKULU | Orang/ Kali | Rp109.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | Orang/ Kali | Rp97.000,00 |
| 11. | BANTEN | Orang/ Kali | Rp536.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA | Orang/ Kali | Rp256.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH | Orang/ Kali | Rp108.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | Orang/ Kali | Rp267.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR | Orang/ Kali | Rp233.000,00 |
| 17. | BALI | Orang/ Kali | Rp227.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/ Kali | Rp231.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/ Kali | Rp116.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | Orang/ Kali | Rp171.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | Orang/ Kali | Rp134.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | Orang/ Kali | Rp180.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | Orang/ Kali | Rp533.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 60 -

| No | PROVINSI | SATUAN | BESARAN |
|-----|-------------------|-------------|--------------|
| 24. | KALIMANTAN UTARA | Orang/ Kali | Rp218.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA | Orang/ Kali | Rp138.000,00 |
| 26. | GORONTALO | Orang/ Kali | Rp265.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT | Orang/ Kali | Rp313.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN | Orang/ Kali | Rp187.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH | Orang/ Kali | Rp165.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | Orang/ Kali | Rp171.000,00 |
| 31. | MALUKU | Orang/ Kali | Rp288.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA | Orang/ Kali | Rp215.000,00 |
| 33. | PAPUA | Orang/ Kali | Rp513.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT | Orang/ Kali | Rp236.000,00 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | Orang/ Kali | Rp236.000,00 |
| 36. | PAPUA TENGAH | Orang/ Kali | Rp513.000,00 |
| 37. | PAPUA SELATAN | Orang/ Kali | Rp513.000,00 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | Orang/ Kali | Rp513.000,00 |

Keterangan:

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. Keberangkatan
 - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel,



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 61 -

sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

4. Satuan biaya taksi termasuk dalam komponen daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (bukti transportasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at*



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 62 -

cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
6. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke bandara maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 15 Liter.
7. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke tempat tujuan maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 1 liter per 8 kilometer.
8. Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas pada tempat tujuan.
9. Sewa Kendaraan dimaksud diberikan dengan Biaya Riil atau *at cost* dengan pagu maksimal Rp. 1.500.000/hari.
10. Sewa Kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|------------------|------------------------|-------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | ACEH | | | |
| 1. | Banda Aceh | Kab. Aceh Barat | Orang/ Kali | Rp275.000,00 |
| 2. | Banda Aceh | Kab. Aceh Barat Daya | Orang/ Kali | Rp298.000,00 |
| 3. | Banda Aceh | Kab. Aceh Besar | Orang/ Kali | Rp183.000,00 |
| 4. | Banda Aceh | Kab AcehJaya | Orang/ Kali | Rp238.000,00 |
| 5. | Banda Aceh | Kab. Aceh Selatan | Orang/ Kali | Rp325.000,00 |
| 6. | Banda Aceh | Kab. Aceh Singkil | Orang/ Kali | Rp420.000,00 |
| 7. | Banda Aceh | Kab. Aceh Tamiang | Orang/ Kali | Rp315.000,00 |
| 8. | Banda Aceh | Kab. Aceh Tengah | Orang/ Kali | Rp293.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 63 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 9. | Banda Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Orang/ Kali | Rp460.000,00 |
| 10. | Banda Aceh | Kab. Aceh Timur | Orang/ Kali | Rp289.000,00 |
| 11. | Banda Aceh | Kab. Aceh Utara | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 12. | Banda Aceh | Kab. Bener Meriah | Orang/ Kali | Rp278.000,00 |
| 13. | Banda Aceh | Kab. Bireuen | Orang/ Kali | Rp220.000,00 |
| 14. | Banda Aceh | Kab. Gayo Lues | Orang / Kali | Rp370.000,00 |
| 15. | Banda Aceh | Kab. Nagan Raya | Orang/ Kali | Rp275.000,00 |
| 16. | Banda Aceh | Kab. Pidie | Orang/ Kali | Rp190.000,00 |
| 17. | Banda Aceh | Kab. Pidie Jaya | Orang/ Kali | Rp205.000,00 |
| 18. | Banda Aceh | Kota Langsa | Orang/ Kali | Rp301.000,00 |
| 19. | Banda Aceh | Kota Lhokseumawe | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 20. | Banda Aceh | Kota Subulussalam | Orang/ Kali | Rp400.000,00 |
| | SUMATERA UTARA | | | |
| 21. | Medan | Kab. Asahan | Orang/ Kali | Rp259.000,00 |
| 22. | Medan | Kab. Batubara | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 23. | Medan | Kab. Dairi | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 24. | Medan | Kab. Deli Serdang | Orang/ Kali | Rp186.000,00 |
| 25. | Medan | Kab. Humbang Hasundutan | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| 26. | Medan | Kab. Karo | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |
| 27. | Medan | Kab. Labuhan Batu | Orang/ Kali | Rp287.000,00 |
| 28. | Medan | Kab. Labuhan Batu Selatan | Orang/ Kali | Rp360.000,00 |
| 29. | Medan | Kab. Labuhan Batu Utara | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| 30. | Medan | Kab. Langkat | Orang/ Kali | Rp186.000,00 |
| 31. | Medan | Kab. Mandailing Natal | Orang/ Kali | Rp420.000,00 |
| 32. | Medan | Kab. Padang Lawas | Orang/ Kali | Rp420.000,00 |
| 33. | Medan | Kab. Padang Lawas Utara | Orang/ Kali | Rp420.000,00 |
| 34. | Medan | Kab. Pakpak Bharat | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| 35. | Medan | Kab. Samosir | Orang/ Kali | Rp330.000,00 |
| 36. | Medan | Kab. Serdang Bedagai | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 64 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 37. | Medan | Kab. Simalungun | Orang /Kali | Rp264.000,00 |
| 38. | Medan | Kab. Tapanuli Selatan | Orang/ Kali | Rp328.000,00 |
| 39. | Medan | Kab. Tapanuli Tengah | Orang/ Kali | Rp345.000,00 |
| 40. | Medan | Kab. Tapanuli Utara | Orang /Kali | Rp330.000,00 |
| 41. | Medan | Kab. Toba | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| 42. | Medan | Kota Binjai | Orang/ Kali | Rp180.000,00 |
| 43. | Medan | Kota Pematang Siantar | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 44. | Medan | Kota Sibolga | Orang/ Kali | Rp345.000,00 |
| 45. | Medan | Kota Tanjung Balai | Orang/ Kali | Rp285.000,00 |
| 46. | Medan | Kota Tebing Tinggi | Orang / Kali | Rp203.000,00 |
| | RIAU | | | |
| 47. | Pekanbaru | Kab. Indragiri Hilir | Orang/ Kali | Rp380.000,00 |
| 48. | Pekanbaru | Kab. Indragiri Hulu | Orang/ Kali | Rp315.000,00 |
| 49. | Pekanbaru | Kab. Kampar | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |
| 50. | Pekanbaru | Kab. Kuantan Singingi | Orang/ Katt | Rp300.000,00 |
| 51. | Pekanbaru | Kab. Pelalawan | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 52. | Pekanbaru | Kab. Rokan Hilir | Orang/ Kali | Rp330.000,00 |
| 53. | Pekanbaru | Kab. Rokan Hulu | Orang / Kali | Rp322.000,00 |
| 54. | Pekanbaru | Kab. Siak | Orang /Kali | Rp350.000,00 |
| 55. | Pekanbaru | Kota Dumai | Orang/ Kali | Rp400.000,00 |
| | KEPULAUAN RIAU | | | |
| 56. | Tanjung Pinang | Kab. Bintan | Orang/ Kali | Rp185.000,00 |
| | JAMBI | | | |
| 57. | Jambi | Kab. Batanghari | Orang/ Kali | Rp175.000,00 |
| 58. | Jambi | Kab. Btingo | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 59. | Jambi | Kab. Kerinci | Orang/ Kali | Rp325.000,00 |
| 60. | Jambi | Kab. Merangin | Orang/ Kali | Rp260.000,00 |
| 61. | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Orang/ Kali | Rp170.000,00 |
| 62. | Jambi | Kab. Sarolangun | Orang/ Kali | Rp241.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 65 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 63. | Jambi | Kab. Tanjung Jabung Barat | Orang / Kali | Rp225.000,00 |
| 64. | Jambi | Kab. Tanjung Jabung Timur | Orang/ Kali | Rp190.000,00 |
| 65. | Jambi | Kab. Tebo | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 66. | Jambi | Kota SungaiPenuh | Orang/ Kali | Rp308.000,00 |
| | SUMATERA BARAT | | | |
| 67. | Padang | Kab. Agam | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 68. | Padang | Kab. Dharmasraya | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 69. | Padang | Kab. Lima Puluh Kota | Orang / Kali | Rp225.000,00 |
| 70. | Padang | Kab. Padang Pariaman | Orang/ Kali | Rp205.000,00 |
| 71. | Padang | Kab. Pasaman | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 72. | Padang | Kab. Pasaman Barat | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 73. | Padang | Kab. Pesisir Selatan | Orang/ Kali | Rp205.000,00 |
| 74. | Padang | Kab. Sijunjung | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 75. | Padang | Kab. Solok | Orang/ Kali | Rp210.000,00 |
| 76. | Padang | Kab. Solok Selatan | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 77. | Padang | Kab. Tanah Datar | Orang/ Kali | Rp220.000,00 |
| 78. | Padang | Kota Bukit Tinggi | Orang/ Kali | Rp215.000,00 |
| 79. | Padang | Kota Padang Panjang | Orang/ Kali | Rp210.000,00 |
| 80. | Padang | Kota Pariaman | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |
| 81. | Padang | Kota Payakumbuh | Orang/ Kai | Rp225.000,00 |
| 82. | Padang | Kota Sawahlunto | Orang/ Kali | Rp215.000,00 |
| 83. | Padang | Kota Solok | Orang/ Kali | Rp210.000,00 |
| | SUMATERA SELATAN | | | |
| 84. | PaJembang | Kab Banyuasin | Orang/ Kali | Rp203.000,00 |
| 85. | Palembang | Kab. Empat Lawang | Orang/ Kali | Rp315.000,00 |
| 86. | Palembang | Kab. Lahat | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 87. | Palembang | Kab. Muara Enim | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 88. | Palembang | Kab. Musi Banyuasin | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 89. | Palembang | Kab. Musi Rawas | Orang/ Kali | Rp320.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 66 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 90. | Palembang | Kab. Musi Rawas Utara | Orang/ Kali | Rp325.000,00 |
| 91. | Palembang | Kab. Ogan Ilir | Orang/ Kali | Rp205.000,00 |
| 92. | Palembang | Kab. Ogan Komering Ilir | Orang/ Kali | Rp205.000,00 |
| 93. | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu | Orang/ Kali | Rp248.000,00 |
| 94. | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 95. | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 96. | Palembang | Kab. Pali | Orang/ Kali | Rp265.000,00 |
| 97. | Palembang | Kota Lubuk Linggau | Orang/ Kali | Rp290.000,00 |
| 98. | Palembang | Kota Pagar Alam | Orang/ Kali | Rp280.000,00 |
| 99. | Palembang | Kota Prabumulih | Orang/ Kali | Rp205.000,00 |
| | LAMPUNG | | | |
| 100. | Bandar Lampung | Kab. Lampung Barat | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 101. | Bandar Lampung | Kab. Lampung Selatan | Orang/ Kali | Rp234.000,00 |
| 102. | Bandar Lampung | Kab. Lampung Tengah | Orang/ Kali | Rp246.000,00 |
| 103. | Bandar Lampung | Kab. Lampung Timur | Orang/ Kali | Rp246.000,00 |
| 104. | Bandar Lampung | Kab. Lampung Utara | Orang/ Kali | Rp252.000,00 |
| 105. | Bandar Lampung | Kab. Mesuji | Orang/ Kali | Rp276.000,00 |
| 106. | Bandar Lampung | Kab. Pesawaran | Orang/ Kali | Rp216.000,00 |
| 107. | Bandar Lampung | Kab. Pesisir Barat | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |
| 108. | Bandar Lampung | Kab. Pringsewu | Orang/ Kali | Rp222.000,00 |
| 109. | Bandar Lampung | Kab. Tanggamus | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 110. | Bandar Lampung | Kab. Tulang Bawang | Orang/ Kali | Rp252.000,00 |
| 111. | Bandar Lampung | Kab. Tulang Bawang Barat | Orang/ Kali | Rp267.000,00 |
| 112. | Bandar Lampung | Kab. Way Kanan | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 113. | Bandar Lampung | Kota Metro | Orang/ Kali | Rp234.000,00 |
| | BENGKULU | | | |
| 114. | Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | Orang/ Kali | Rp344.000,00 |
| 115. | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | Orang/ Kali | Rp232.000,00 |
| 116. | Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara | Orang/ Kali | Rp313.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 67 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 117. | Bengkulu | Kab. Kaur | Orang/ Kali | Rp385.000,00 |
| 118. | Bengkulu | Kab. Kepahiang | Orang/ Kali | Rp298.000,00 |
| 119. | Bengkulu | Kab. Lebong | Orang/ Kali | Rp375.000,00 |
| 120. | Bengkulu | Kab. Mukomuko | Orang/ Kali | Rp423.000,00 |
| 121. | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | Orang/ Kali | Rp313.000,00 |
| 122. | Bengkulu | Kab. Seluma | Orang/ Kali | Rp282.000,00 |
| | BANGKA BELITUNG | | | |
| 123. | Pangkalpinang | Kab. Bangka | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 124. | Pangkalpinang | Kab. Bangka Barat | Orang/ Kali | Rp275.000,00 |
| 125. | Pangkalpinang | Kab. Bangka Selatan | Orang/ Kali | Rp275.000,00 |
| 126. | Pangkalpinang | Kab. Bangka Tengah | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| | BANTEN | | | |
| 127. | Serang | Kab. Lebak | Orang/ Kali | Rp208.000,00 |
| 128. | Serang | Kab. Pandeglang | Orang/ Kali | Rp138.000,00 |
| 129. | Serang | Kab. Serang | Orang/ Kali | Rp160.000,00 |
| 130. | Serang | Kab. Tangerang | Orang/ Kali | Rp254.000,00 |
| 131. | Serang | Kota Cilegon | Orang/ Kali | Rp160.000,00 |
| 132. | Serang | Kota Tangerang | Orang/ Kali | Rp313.000,00 |
| 133. | Serang | Kota Tangerang Selatan | Orang / Kali | Rp347.000,00 |
| | JAWA BARAT | | | |
| 134. | Bandung | Kab. Bandung | Orang/ Kali | Rp183.000,00 |
| 135. | Bandung | Kab. Bandung Barat | Orang/ Kali | Rp275.000,00 |
| 136. | Bandung | Kab. Bekasi | Orang/ Kali | Rp265.000,00 |
| 137. | Bandung | Kab. Bogor | Orang/ Kali | Rp185.000,00 |
| 138. | Bandung | Kab. Ciamis | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 139. | Bandung | Kab. Cianjur | Orang/ Kali | Rp2 15.000 |
| 140. | Bandung | Kab. Cirebon | Orang/ Kali | Rp280.000,00 |
| 141. | Bandung | Kab. Garut | Orang / Kali | Rp243.000,00 |
| 142. | Bandung | Kab. Indramayu | Orang/ Kali | Rp275.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 68 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 143. | Bandung | Kab. Karawang | Orang/ Kali | Rp248.000,00 |
| 144. | Bandung | Kab. Kuningan | Orang / Kali | Rp275.000,00 |
| 145. | Bandung | Kab. Majalengka | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 146. | Bandung | Kab. Pangadaran | Orang/ Kali | Rp283.000,00 |
| 147. | Bandung | Kab. Purwakarta | Orang/ Kali | Rp218.000,00 |
| 148. | Bandung | Kab. Subang | Orang/ Kali | Rp208.000,00 |
| 149. | Bandung | Kab. Sukabumi | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 150. | Bandung | Kab. Sumedang | Orang / Kari | Rp230.000,00 |
| 151. | Bandung | Kab. Tasikmalaya | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 152. | Bandung | Kota Banjar | Orang/ Kalt | Rp283.000,00 |
| 153. | Bandung | Kota Bekasi | Orang/ Kali | Rp265.000,00 |
| 154. | Bandung | Kota Bogor | Orang/ Kali | Rp285.000,00 |
| 155. | Bandung | Kota Cimahi | Orang/ Kali | Rp168.000,00 |
| 156. | Bandung | Kota Cirebon | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 157. | Bandung | Kota Depok | Orang/ Kali | Rp275.000,00 |
| 158. | Bandung | Kota Sukabumi | Orang / Kali | Rp226.000,00 |
| 159. | Bandung | Kota Tasikmalaya | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| | JAWA TENGAH | | | |
| 160. | Semarang | Kab. Banjarnegara | Orang / Kali | Rp260.000,00 |
| 161. | Semarang | Kab. Banyumas | Orang/ Kali | Rp257.000,00 |
| 162. | Semarang | Kab. Batang | Orang / Kali | Rp240.000,00 |
| 163. | Semarang | Kab. Blora | Orang/ K ai | Rp270.000,00 |
| 164. | Semarang | Kab. Boyolali | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 165. | Semarang | Kab. Brebes | Orang / Kali | Rp263.000,00 |
| 166. | Semarang | Kab. Cilacap | Orang/ Kali | Rp280.000,00 |
| 167. | Semarang | Kab. Demak | Orang / Kali | Rp230.000,00 |
| 168. | Semarang | Kab. Grobogan | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 169. | Semarang | Kab. Jepara | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 170. | Semarang | Kab. Karanganyar | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 171. | Semarang | Kab. Kebumen | Orang/ Kali | Rp260.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 69 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 172. | Semarang | Kab. Kendal | Orang/ Kali | Rp230.000,00 |
| 173. | Semarang | Kab. Klaten | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 174. | Semarang | Kab. Kudus | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 175. | Semarang | Kab. Magelang | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 176. | Semarang | Kab. Pati | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 177. | Semarang | Kab. Pekalongan | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 178. | Semarang | Kab. Pemalang | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 179. | Semarang | Kab. Purbalingga | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 180. | Semarang | Kab. Purworejo | Orang /Kali | Rp250.000,00 |
| 181. | Semarang | Kab. Rembang | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 182. | Semarang | Kab. Semarang | Orang/ Kali | Rp230.000,00 |
| 183. | Semarang | Kab. Sragen | Orang / Kali | Rp250.000,00 |
| 184. | Semarang | Kab. Sukoharjo | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 185. | Semarang | Kab. Tegal | Orang/ Kali | Rp260.000,00 |
| 186. | Semarang | Kab. Temanggu ng | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 187. | Semarang | Kab. Wonogiri | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 188. | Semarang | Kab. Wonosobo | Orang / Kali | Rp250.000,00 |
| 189. | Semarang | Kota Magelang | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 190. | Semarang | Kota Pekalongan | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 191. | Semarang | Kota Salatiga | Orang / Kali | Rp235.000,00 |
| 192. | Semarang | Kota Surakarta | Orang / Kali | Rp245.000,00 |
| 193. | Semarang | Kota Tegal | Orang / Kali | Rp260.000,00 |
| | D.I. YOGYAKARTA | | | |
| 194. | Yogyakarta | Kab. Bantul | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 195. | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | Orang/ Kali | Rp350.000,00 |
| 196. | Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | Orang / Kali | Rp350.000,00 |
| 197. | Yogyakarta | Kab. Sleman | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |
| | JAWA TIMUR | | | |
| 198. | Surabaya | Kab. Bangkalan | Orang / Kali | Rp225.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 70 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 199. | Surabaya | Kab. Banyuwangi | Orang/ Kali | Rp285.000,00 |
| 200. | Surabaya | Kab. Blitar | Orang/ Kali | Rp255.000,00 |
| 201. | Surabaya | Kab. Bojonegoro | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 202. | Surabaya | Kab. Bondowoso | Orang/ Kali | Rp255.000,00 |
| 203. | Surabaya | Kab. Gresik | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 204. | Surabaya | Kab. Jember | Orang/ Kali | Rp261.000,00 |
| 205. | Surabaya | Kab. Jombang | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 206. | Surabaya | Kab. Kediri | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 207. | Surabaya | Kab. Lamongan | Orang/ KaJi | Rp225.000,00 |
| 208. | Surabaya | Kab. Lumajang | Orang / Kali | Rp261.000,00 |
| 209. | Surabaya | Kab. Madiun | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 210. | Surabaya | Kab. Magetan | Orang/ Kali | Rp253.000,00 |
| 211. | Surabaya | Kab. Malang | Orang/ Kali | Rp228.000,00 |
| 212. | Surabaya | Kab. Mojokerto | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 213. | Surabaya | Kab. Nganjuk | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 214. | Surabaya | Kab. Ngawi | Orang/ Kali | Rp253.000,00 |
| 215. | Surabaya | Kab. Pacitan | Orang/ Kali | Rp285.000,00 |
| 216. | Surabaya | Kab. Pamekasan | Orang/ Kali | Rp243.000,00 |
| 217. | Surabaya | Kab. Pasuruan | Orang/ Kali | Rp228.000,00 |
| 218. | Surabaya | Kab. Ponorogo | Orang/ Kali | Rp255.000,00 |
| 219. | Surabaya | Kab. Probolinggo | Orang/ Kali | Rp228.000,00 |
| 220. | Surabaya | Kab. Sampang | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 221. | Surabaya | Kab. Sidoarjo | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 222. | Surabaya | Kab. Situbondo | Orang/ Kali | Rp255.000,00 |
| 223. | Surabaya | Kab. Sumenep | Orang/ Kali | Rp255.000,00 |
| 224. | Surabaya | Kab. Trenggalek | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 225. | Surabaya | Kab. Tuban | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 226. | Surabaya | Kab. Tulungagung | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 227. | Surabaya | Kota Batu | Orang/ Kali | Rp242.000,00 |
| 228. | Surabaya | Kota Blitar | Orang/ Kali | Rp255.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 71 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 229. | Surabaya | Kota Bojonegoro | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 230. | Surabaya | Kota Kediri | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 231. | Surabaya | Kota Madiun | Orang/ Kali | Rp245.000,00 |
| 232. | Surabaya | Kota Malang | Orang/ Kali | Rp228.000,00 |
| 233. | Surabaya | Kota Mojokerto | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 234. | Surabaya | Kota Probolinggo | Orang/ Kali | Rp228.000,00 |
| | BALI | | | |
| 235. | Denpasar | Kab. Badung | Orang/ Kali | Rp188.000,00 |
| 236. | Denpasar | Kab. Bangli | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 237. | Denpasar | Kab. Buleleng | Orang/ Kali | Rp265.000,00 |
| 238. | Denpasar | Kab. Gianyar | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| 239. | Denpasar | Kab. Jembrana | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 240. | Denpasar | Kab. Karangasem | Orang/ Kali | Rp263.000,00 |
| 241. | Denpasar | Kab. Tabanan | Orang /Kali | Rp225.000,00 |
| | NUSA TENGGARA BAR | AT | | |
| 242. | Mataram | Kab Lombok Barat | Orang/ Kali | Rp325.000,00 |
| 243. | Mataram | Kab. Lombok Tengah | Orang/ Kali | Rp450.000,00 |
| 244. | Mataram | Kab. Lombok Timur | Orang/ Kali | Rp350.000,00 |
| | NUSA TENGGARA TIMUR | | | |
| 245. | Kupang | Kab. Belu | Orang/ Kali | Rp325.000,00 |
| 246. | Kupang | Kab Kupang | Orang/ Kali | Rp175.000,00 |
| 247. | Kupang | Kab Timor Tengah Selatan | Orang/ Kali | Rp218.000,00 |
| 248. | Kupang | Kab Timor Tengah Utara | Orang/ Kali | Rp275.000,00 |
| | KALIMANTAN BARAT | | | |
| 249. | Pontianak | Kab. Bengkayang | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 250. | Pontianak | Kab. Kapuas Hulu | Orang/ Kali | Rp550.000,00 |
| 251. | Pontianak | Kab. Kayong Utara | Orang/ Kali | Rp550.000,00 |
| 252. | Pontianak | Kab. Ketapang | Orang/ Kali | Rp550.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 72 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 253. | Pontianak | Kab. Kubu Raya | Orang / Kali | Rp185.000,00 |
| 254. | Pontianak | Kab. Landak | Orang/ Kali | Rp270.000,00 |
| 255. | Pontianak | Kab. Melawi | Orang/ Kali | Rp430.000,00 |
| 256. | Pontianak | Kab. Mempawah | Orang/ Kali | Rp230.000,00 |
| 257. | Pontianak | Kab. Sambas | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| 258. | Pontianak | Kab. Sanggau | Orang/ Kali | Rp303.000,00 |
| 239. | Pontianak | Kab. Sekadau | Orang/ Kali | Rp343.000,00 |
| 260. | Pontianak | Kab. Sintang | Orang / Kali | Rp392.000,00 |
| 261. | Pontianak | Kota Singkawang | Orang/ Kali | Rp257.000,00 |
| | KALIMANTAN TENGAH | | | |
| 262. | Palangkaraya | Kab. Barito Selatan | Orang/ Kali | Rp290.000,00 |
| 263. | Palangkaraya | Kab. Barito Timur | Orang/ Kali | Rp333.000,00 |
| 264. | Palangkaraya | Kab. Barito Utara | Orang/ Kali | Rp425.000,00 |
| 265. | PalangRaraya | Kab. Gunung Mas | Orang / Kali | Rp300.000,00 |
| 266. | PalangRaraya | Kab. Kapuas | Orang /Kali | Rp275.000,00 |
| 267. | Palangkaraya | Kab. Katingan | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 268. | Palangkaraya | Kab. Kotawaringin Barat | Orang/ Kali | Rp425.000,00 |
| 269. | Palangkaraya | Kab. Kotawaringin Timur | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| 270. | Palangkaraya | Kab. Lamandau | Orang/ Kali | Rp525.000,00 |
| 271. | Palangkaraya | Kab. Murung Raya | Orang/ Kai | Rp448.000,00 |
| 272. | Palangkaraya | Kab. Pulau Pisau | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 273. | Palangkaraya | Kab. Seruyan | Orang/ Kali | Rp328.000,00 |
| 274. | PNangkaraya | Kab. Sukamara | Orang/ Kali | Rp525.000,00 |
| | KALIMANTAN SELATAN | | | |
| 275. | Banjarmasin | Kab. Balangan | Orang/ Kali | Rp230.000,00 |
| 276. | Banjarmasin | Kab. Banjar | Orang/ Kali | Rp170.000,00 |
| 277. | Banjarmasin | Kab. Barito Kuala | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |
| 278. | Banjarmasin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |
| 279. | Banjarmasin | Kab. Hulu Sungai Tengah | Orang/ Kali | Rp212.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 73 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 280. | Banjarmasin | Kab. Hulu Sungai Utara | Orang/ Kali | Rp218.000,00 |
| 281. | Banjarmasin | Kab. Kota Baru | Orang/ Kali | Rp290.000,00 |
| 282. | Banjarmasin | Kab. Tabalong | Orang/ Kali | Rp234.000,00 |
| 283. | Banjarmasin | Kab. Tanah Bumbu | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| 284. | Banjarmasin | Kab. Tanah Laut | Orang/ Kali | Rp200.000,00 |
| 285. | Banjarmasin | Kab. Tapin | Orang/ Kali | Rp189.000,00 |
| 286. | Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| | KALIMANTAN TIMUR | | | |
| 287. | Samarinda | Kab. Kutai Barat | Orang/ Kali | Rp1.500.000,00 |
| 288. | Samarinda | Kab. Kutai Kartanegara | Orang/ Kali | Rp500.000,00 |
| 289. | Samarinda | Kab. Kutai Timur | Orang/ Kali | Rp1.350.000,00 |
| 290. | Samarinda | Kab. Paser | Orang/ Kali | Rp 1.650.000 |
| 291. | Samarinda | Kab. Penajam Paser Utara | Orang/ KaG | Rp650.000 |
| 292. | Samannnda | Kota Balikpapan | Orang/ Kali | Rp550.000,00 |
| 293. | Samannnda | Kota Bontang | Orang/Kali | Rp600. 000 |
| | SULAWESI UTA | | | |
| 294. | Manado | Kab. Bolaang Mongondow | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 295. | Manado | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Orang /Kali | Rp275.000,00 |
| 296. | Manado | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 297. | Manado | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| 298. | Manado | Kab. Minahasa | Orang/ Kali | Rp180.000,00 |
| 299. | Manado | Kab. Minahasa Selatan | Orang/ Kali | Rp180.000,00 |
| 300. | Manado | Kab. Minahasa Tenggara | Orang /Kali | Rp200.000,00 |
| 301. | Manado | Kab. Minahasa Utara | Orang/ Kali | Rp175.000,00 |
| 302. | Manado | Kota Bitung | Orang/ Kali | Rp175.000,00 |
| 303. | Manado | Kota Kotamobagu | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 304. | Manado | Kota Tomohon | Orang/ Kali | Rp170.000,00 |
| | GORONTALO | | | |
| 305. | Gorontalo | Kab. Boalemo | Orang /Kali | Rp400.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 74 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 306. | Gorontalo | Kab. Gorontalo | Orang / Kali | Rp300.000,00 |
| 307. | Gorontalo | Kab. Gorontalo Utara | Orang/ Kali | Rp350.000,00 |
| 308. | Gorontalo | Kab. Pahuwato | Orang/ Kali | Rp650.000,00 |
| | SULAWESI BARAT | | | |
| 309. | Mamuju | Kab. Maene | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 310. | Mamuju | Kab. Mamasa | Orang/ Kali | Rp359.000,00 |
| 311. | Mamuju | Kab. Mamuju Tengah | Orang/ Kaji | Rp200.000,00 |
| 312. | Mamuju | Kab. Pasangkayu | Orang/Kaji | Rp270.000,00 |
| 313. | Mamuju | Kab. Polewali Mandar | Orang/ Kali | Rp260.000,00 |
| | SULAWESI SELATAN | | | |
| 314. | Makassar | Kab. Bantaeng | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 315. | Makassar | Kab. Barru | Orang/ Kali | Rp210.000,00 |
| 316. | Makassar | Kab. Bone | Orang/ Kali | Rp240.000,00 |
| 317. | Makassar | Kab. Bulukumba | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 318. | Makassar | Kab. Enrekang | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 319. | Makassar | Kab. Gowa | Orang/ Kali | Rp175.000,00 |
| 320. | Makassar | Kab. Jeneponto | Orang/ Kali | Rp230.000,00 |
| 321. | Makassar | Kab. Luwu | Orang/ Kali | Rp350.000,00 |
| 322. | Makassar | Kab. Luwu Timur | Orang/ Kali | Rp375.000,00 |
| 323. | Makassar | Kab. Luwu Utara | Orang/ Kali | Rp365.000,00 |
| 324. | Makassar | Kab. Maros | Orang /Kali | Rp170.000,00 |
| 325. | Makassar | Kab. Pinrang | Orang/ Kali | Rp230.000,00 |
| 326. | Makassar | Kab. Sidenreng Rappang | Orang/ Kali | Rp230.000,00 |
| 327. | Makassar | Kab. Sinjai | Orang /Kali | Rp235.000,00 |
| 328. | Makassar | Kab. Soppeng | Orang/ Kali | Rp235.000,00 |
| 329. | Makassar | Kab. Takalar | Orang /Kai | Rp190.000,00 |
| 330. | Makassar | Kab. Tanatoraja | Orang/ Kali | Rp350.000,00 |
| 331. | Makassar | Kab. Toraja Utara | Orang/ Kali | Rp350.000,00 |
| 332. | Makassar | Kab. Wajo | Orang /Kali | Rp230.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 75 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 333. | Makassar | Kota Palopo | Orang/ Kali | Rp350.000,00 |
| 334. | Makassar | Kota Pare—Pare | Orang/ Kali | Rp225.000,00 |
| | SULAWESI TENGAH | | | |
| 335. | Palu | Kab. Luwuk | Orang/ Kali | Rp400.000,00 |
| 336. | Palu | Kab. Buol | Orang /Kali | Rp472.000,00 |
| 337. | Palu | Kab. Donggala | Orang/ Kali | Rp130.000,00 |
| 338. | Palu | Kab. Morowali | Orang/ Kali | Rp400.000,00 |
| 339. | Palu | Kab. Morowali Utara | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 340. | Palu | Kab. Parigi Moutong | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| 341 | Palu | Kab. Poso | Orang /Kali | Rp280.000,00 |
| 342. | Palu | Kab. Sigi | Orang/ Kali | Rp219.000,00 |
| 343. | Palu | Kab. Tojouna-Una | Orang / Kali | Rp350.000,00 |
| 344. | Pam | Kab. Toli-Toli | Orang/ Kali | Rp412.000,00 |
| | SULAWESI TENGGARA | | | |
| 345. | Kendari | Kab. Bombana | Orang/ Kali | Rp355.000,00 |
| 346. | Kendari | Kab. Kolaka | Orang/ Kali | Rp370.000,00 |
| 347. | Kendari | Kab. Kolaka Timur | Orang / Kali | Rp300.000,00 |
| 348. | Kendari | Kab. Kolaka Utara | Orang/ Kali | Rp425.000,00 |
| 349. | Kendari | Kab. Konawe | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| 350. | Kendari | Kab. Konawe Selatan | Orang/ Kali | Rp305.000,00 |
| 351 . | Kendari | Kab. Konawe Utara | Orang/ Kali | Rp300.000,00 |
| | MALUKU UTARA | | | |
| 352. | Sofifi | Kab. Halmahera Barat | Orang/Kali | Rp850.000,00 |
| 353. | Sofifi | Kab. Halmahera Tengah | Orang/Kali | Rp1.000.000,00 |
| 354. | SoFtfi | Kab. Halmahera Timur | Orang/Kali | Rp1.250.000,00 |
| 355. | Sofifi | Kab. Halmahera Utara | Orang/ Kali | Rp900.000,00 |
| | PAPUA | | | |
| 356. | Jayapura | Kab. Jayapura | Orang / Kali | Rp600.000,00 |
| 357. | Jayapura | Kab. Keerom | Orang/ Kali | Rp900.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 76 -

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 358. | Jayapura | Kab. Sarmi | Orang /Kali | Rp2.700.000,00 |
| 359. | Jayapura | Kab. Merauke | Orang/ Kali | Rp1.134.000,00 |
| | PAPUA BARAT | | | |
| 360. | Manokwari | Kab Teluk Bintuni | Orang/ Kali | Rp900.000,00 |
| 361. | Manokwari | Kab Manokwari Selatan | Orang/ Kali | Rp750.000,00 |
| 362. | Manokwari | Kab. Pegunungan Arfak | Orang/ Kali | Rp2.650.000,00 |
| 363. | Manokwari | Kota Sorong | Orang/Kali | Rp1.000.000,00 |

Keterangan:

1. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (bukti transportasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

| NO. | Ibukota Propinsi | Kota/Kabupaten Tujuan | Besaran |
|-----|------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Jakarta | Kota Bekasi | Rp284.000,00 |
| 2. | Jakarta | Kabupaten Bekasi | Rp284.000,00 |
| 3. | Jakarta | Kabupaten Bogor | Rp300.000,00 |
| 4. | Jakarta | Kota Bogor | Rp300.000,00 |
| 5. | Jakarta | Kota Depok | Rp275.000,00 |
| 6. | Jakarta | Kota Tangerang | Rp286.000,00 |
| 7. | Jakarta | Kota Tangerang Selatan | Rp286.000,00 |
| 8. | Jakarta | Kabupaten Tangerang | Rp310.000,00 |
| 9. | Jakarta | Kepulauan Seribu | Rp428.000,00 |



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 77 -

Keterangan:

1. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (bukti transportasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

Keterangan:

OH : Orang/Hari

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ROBERIA', written over a horizontal line.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 78 -

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

DAFTAR PENGELUARAN RIIL, PAKTA INTEGRITAS, DAN KUITANSI

A. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Logo
Daerah

KOP DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKPD

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPP) Nomor:..... tanggal..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi:

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|---|------------------------------|
| 1. | Biaya Pengeluaran Riil : Taxi Kantor – Bandara BIM (PP) Taxi Bandara Tujuan (Halim Perdana Kusuma) – Hotel di Jakarta (PP) | Rp380.000,00 Rp512.000,00 |
| 2 | Biaya Penginapan : 30% x 2 malam x Rp730.000,00 | Rp438.000,00 |
| | JUMLAH | Rp1.330.000,00 |

Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Pengguna Anggaran

Yang melakukan Perjalanan Dinas

.....

.....



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 79 -

B. PAKTA INTEGRITAS

Logo
Daerah

KOP DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ... tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan ... ke ... dari tanggal ... s.d. ...
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetor kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp10.000,00

.....



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 80 -

C. KUITANSI

Logo
Daerah

KOP DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....

Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

Dengan rincian:

1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang refresentasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

.....20..
Penerimaan

Materai
Rp10.000.00

ttd

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

ttd

ttd

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA